



International
Labour
Organization



Pekerjaan Perawatan dari Perspektif Media

Kompilasi Peliputan Media mengenai Ekonomi Perawatan di Indonesia

Program Beasiswa Media untuk Mempromosikan Konsep Ekonomi Perawatan ILO



Pekerjaan Perawatan dari Perspektif Media

Kompilasi Peliputan Media mengenai
Ekonomi Perawatan di Indonesia

Program Beasiswa Media untuk Mempromosikan Konsep
Ekonomi Perawatan ILO

Pekerjaan Perawatan dari Perspektif Media

Kompilasi Peliputan Media mengenai Ekonomi Perawatan di Indonesia

PENULIS:

Titis Anis Fauziyah
Rizal Kurniawan
Lidya Salmah
Caecilia Mediana
Aan Arieska Febriansyah
Petrus Fidelis Ngo
Indriani
Arief Rahman
Feni Freycinetia Fitriani
Afwan Purwanto

MENTOR:

Devi Asmarani
Retno Sulistyowati

TIM ILO:

Gita Lingga
Early Dewi Nuriana

CETAKAN PERTAMA: Maret 2025

DITERBITKAN OLEH:



Aliansi Jurnalis Independen (AJI) JAKARTA
Jakarta Chapter of Alliance of Independent Journalists
Jl. Kalibata Timur IV G No 10,
Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740
E-mail: sekretariat@ajijakarta.org, Web : <http://www.ajijakarta.org>

DIDUKUNG OLEH:



International
Labour
Organization

Daftar Isi

Kata Pengantar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta	5
Kata Pengantar ILO	7
Kata Pengantar Mentor	7
 Titis Anis Fauziyah - <i>Kompas.com</i> , 01. Garpu Perak Gaungkan Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak Lewat Khutbah Jumat, Begini Tantangannya	9
 Rizal Kurniawan - <i>kolomdesa.com</i> , 02. Perempuan, Desa dan Kerja- kerja Perawatan yang Luput Dibicarakan	18
 Lidya Salmah - <i>Tribun-Papua.com</i> , 03. Posyandu Lansia: Lebih dari Sekadar Tempat Kumpul, Ini Soal Gizi, Kesehatan Hingga Ekonomi Perawatan	32
 Caecilia Mediana - <i>Kompas.id</i> , 04. Buruh Pabrik dan Keterbatasan "Daycare" Layak	51
 Aan Ariska Febriansyah - <i>rri.co.id</i> , 05. Perjuangan Buruh Pengupas Bawang, Kerja Sambil Momong Anak	60
 Petrus Fidelis Ngo - <i>Parboaboa.com</i> , 06. Potret Buram Perawat Lansia di Jabodetabek	67
 Indriani - <i>Antaranews.com</i> , 07. Taman Pengasuhan Anak, Pondasi Masa Depan	80
 Feni Freycinetia Fitriani - <i>plus.bisnis.com</i> , 08. Kisah Caregiver, 'Malaikat' Penjaga Kala Usia Senja	89
 Arief Rahman - <i>Narasi TV</i> , 09. Guru PAUD Bertahan Hidup dengan Gaji Rp250.000 per Bulan	110
 Afwan Purwanto - <i>Kompas TV</i> , 10. Merawat Anak Berkebutuhan Khusus, Ibu Berhenti Kerja	113

Kata Pengantar

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta

Budaya patriarki di Indonesia menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama perawatan dalam rumah tangga. Perempuan memiliki beban ganda; bekerja di tempat kerja dan melakukan pekerjaan perawatan di rumah, seperti memasak, mencuci, mengasuh anak, dan lain-lain. Data dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 2022 mengungkapkan, sekitar 75 persen pekerjaan perawatan yang tidak dibayar di seluruh dunia dilakukan oleh perempuan. Pekerjaan perawatan yang cukup berat tersebut belum diakui memiliki kontribusi ekonomi.

Saat ini, ekonomi perawatan tengah dibahas di berbagai forum internasional. Menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women), ekonomi perawatan (care economy) dapat didefinisikan sebagai pekerjaan reproduktif meliputi aktivitas berbayar maupun tidak berbayar yang mencakupi pemberi layanan (caregiver) atau dalam papernya disebut sebagai pekerja perawatan (care worker) dan penerima layanan perawatan (care receiver). Ekonomi perawatan juga memiliki keterkaitan secara signifikan terhadap upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Penelitian ILO pada 2022 tentang ekonomi perawatan di Indonesia mengungkapkan, investasi negara dalam perawatan anak universal dan layanan perawatan jangka panjang akan menghasilkan sekitar 10,4 juta lapangan pekerjaan pada 2035. Investasi dalam paket kebijakan perawatan komprehensif juga dapat mengurangi kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja sebesar 5,5 persen.

ILO mempromosikan konsep 5R (rekognisi, reduksi, redistribusi, reward, dan representasi) yang menyediakan kerangka kebijakan untuk menghargai pekerjaan perawatan. Konsep tersebut sudah diterapkan dengan baik di beberapa negara.

Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerbitkan kebijakan Peta Jalan Kerja Perawatan 2024, yang mencakup pengembangan pelayanan pengasuhan dan pendidikan anak usia dini, layanan perawatan lansia, akses yang lebih besar pada cuti hamil dan cuti ayah, pengakuan pekerjaan yang layak bagi pekerja perawatan, dan program perlindungan sosial untuk ekonomi perawatan. Kebijakan tersebut masih menemui jalan terjal. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum disahkan dan kebijakan hak cuti juga belum optimal.

Di media sendiri, isu tersebut masih minim sorotan. Padahal melalui media, isu ini dapat meningkatkan kesadaran publik dan pemerintah tentang pentingnya pekerjaan perawatan. Maka, untuk mengarusutamakan isu tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta bekerja sama dengan ILO membuat program pelatihan jurnalis dan beasiswa peliputan tentang Ekonomi Perawatan.

Pada salah satu sesi workshop, 30 peserta jurnalis memaparkan ide liputan. Sepuluh (10) jurnalis dipilih oleh AJI Jakarta, ILO, dan mentor untuk mendapatkan beasiswa peliputan. Dalam waktu kurang lebih 2 bulan, peserta berhasil menyelesaikan karya jurnalistiknya dan termuat di medianya masing-masing. Selama proses peliputan, para peserta didampingi oleh 2 mentor jurnalis senior, yaitu Devi Asmarani (Magdalene) dan Retno Sulistyowati (Tempo). Pendampingan berupa penajaman ide liputan, saran ketika ada persoalan di lapangan, dan pada saat menulis/memproduksi berita.

Buku ini adalah kumpulan karya indepth reporting dari 10 peserta yang mendapat beasiswa peliputan. Dengan adanya buku ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep Ekonomi Perawatan serta memberikan masukan bagi para pemangku kepentingan.

Irsyan Hasyim
Ketua AJI Jakarta

Kata Pengantar

International Labour Organization (ILO)

Media memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk wacana publik, memengaruhi persepsi dan mendorong perubahan sosial. Dalam hal pekerjaan dan ekonomi perawatan, saluran media—baik tradisional maupun digital—memainkan peran penting dalam menyoroti kontribusi pekerja perawatan yang sering diabaikan, terutama perempuan, yang menjadi tulang punggung layanan perawatan.

Melalui pelaporan yang mendalam dan penceritaan yang menarik, media dapat menjelaskan signifikansi ekonomi dari pekerjaan perawatan, menunjukkan bagaimana investasi dalam ekonomi perawatan—terutama dalam layanan pengasuhan anak dan perawatan jangka panjang—dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi. Dengan memperkuat aspirasi, menampilkan wawasan berbasis data dan menantang stereotip yang sudah ketinggalan zaman, platform media dapat mendorong para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk memprioritaskan infrastruktur perawatan sebagai pendorong utama penciptaan lapangan kerja dan pembangunan berkelanjutan.

Di dunia saat ini, di mana informasi sangat penting, media memainkan peran penting dalam menjembatani pengetahuan dan aksi—mendidik, memobilisasi dan mengadvokasi isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi perawatan. Menyadari hal ini, ILO menghargai kolaborasinya dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, yang telah memberikan peningkatan kapasitas dan dukungan melalui program pelatihan dan beasiswa media.

Kemitraan ini telah menghasilkan publikasi 10 artikel investigasi mendalam oleh para jurnalis dari berbagai media lokal dan nasional terkemuka, termasuk media cetak, daring dan televisi, yang menyoroti empat dari tujuh isu strategis utama yang diuraikan dalam Peta Jalan Ekonomi Perawatan Indonesia 2025-

2045, yang diluncurkan pada bulan Maret 2024, yaitu layanan pengasuhan anak, layanan perawatan lansia, layanan perawatan inklusif, peningkatan keterlibatan laki-laki dalam perawatan dan pengakuan terhadap pekerja perawatan.

Publikasi ini bertujuan untuk lebih memperkuat prioritas konten dan peliputan pekerjaan perawatan di meja editorial dan di antara para jurnalis baik di tingkat nasional maupun regional. Karenanya, publikasi ini berupaya mendukung integrasi dan penerapan tujuh prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029.

Kami percaya bahwa publikasi ini dapat memperkuat peran media dalam menumbuhkan budaya dan lingkungan sosial yang mendukung kesetaraan gender dan mempercepat implementasi Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan Indonesia. Jika diterapkan dengan baik, kita akan melihat peningkatan substansial dalam tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan dari sekitar 56 persen pada 2024 menjadi 60 persen pada 2029 dan 70 persen pada 2045 sesuai target Pemerintah Indonesia.

Simrin Singh

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste

Kata Pengantar Mentor

Program beasiswa peliputan tentang Ekonomi Perawatan ini sangat penting, karena ekonomi perawatan sebagai isu terlihat masih sangat jauh dari masyarakat. Media yang harusnya mendekatkan isu penting ke masyarakat masih belum memahami “barang” apa ini, sehingga mereka tidak dapat merefleksikan dan meng-capture isu ini dalam kerja-kerja jurnalistik.

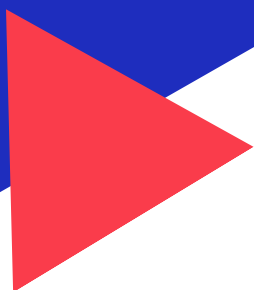
Jurnalis diberikan bekal pelatihan terlebih dulu, sebelum jurnalis terjun ke lapangan untuk meliput isu ini. Dengan bekal pemahaman yang cukup saat pelatihan, membuat jurnalis bisa mengambil angle yang lebih tajam, menyorot fenomena yang terjadi di masyarakat.

Bentuk output program ini kami rasa sangat menarik dengan memberi kebebasan kepada jurnalis untuk mengusulkan angle liputannya, tanpa ada ikatan atau syarat tertentu.

Kami mengapresiasi AJI Jakarta dan ILO yang mendorong pengarusutamaan isu ini dan perspektif gender dalam peliputan seputar ekonomi perawatan. Kami juga berterimakasih telah diberi ruang untuk berbagi pengalaman dan perspektif media kami dalam meliput isu ini. Senang juga menjadi mentor untuk kawan-kawan jurnalis penerima fellowship. Semoga ke depannya lebih banyak narasi tentang ekonomi perawatan yang dapat meningkatkan kesadaran publik akan isu ini.

Devi Asmarani dan Retno Sulistyowati

1



► 01. Garpu Perak Gaungkan Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak Lewat Khutbah Jumat, Begini Tantangannya

Titis Anis Fauziah, Kompas.com

SEMARANG, KOMPAS.com - Selama dua tahun terakhir, dosen dan khotib Nur Hasyim, sering menyampaikan materi khutbah tentang keluarga sakinah dan anti kekerasan di tempat tinggalnya di Boja, Kendal, Jawa Tengah.

Salah satu tema yang diangkat oleh dosen FISIP UIN Walisongo itu adalah pentingnya kehadiran dan peran ayah dalam keluarga, mengangkat fenomena “fatherless country” yang beberapa tahun terakhir ramai menjadi perbincangan masyarakat.



Dosen Sosiologi Gender UIN Walisongo Semarang, Nur Hasyim ditemui di kantornya, Senin (17/2/2025). (KOMPAS.COM/Titis Anis Fauziah)

Dosen Sosiologi Gender UIN Walisongo Semarang itu menuturkan, sejatinya dalam ajaran Islam, ayah memiliki tanggung jawab besar terhadap anak dan istri dalam seluruh aspek. Mulai dari kebutuhan spiritual, sosial, psikologis, emosional, hingga intelektual.

"Misalnya di Indonesia itu mengalami ketidakhadiran ayah. Jadi apa konsekuensinya pada fatherless? Anak-anak tidak memiliki kedekatan secara emosional dengan ayah, lalu peran ayah cenderung dimaknai secara sempit, mereka merasa bahwa kalau udah memenuhi kebutuhan material itu dianggap sudah tuntas, padahal menjadi ayah tidak melulu hanya soal pemenuhan material, tapi juga kebutuhan yang lain," ungkap lulusan University of Wollongong Australia itu saat diwawancarai, Senin (17/2/2025).

20,9 Persen Anak Indonesia Tumbuh Tanpa Ayah

Data UNICEF 2021 mencatat, 20,9 persen anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah karena kentalnya anggapan bila ayah hanya bertanggung jawab sebagai pemberi nafkah. Sebagai penceramah di khutbah Jumat, dia mengajak jamaahnya merenungkan kembali tentang ajaran Islam di surat Al-Luqman yang memerintahkan ayah untuk terlibat dalam pengasuhan anak dan pekerjaan domestik.

"Dalam surat Al Luqman, yang diperintah untuk mengasuh anak itu justru laki-laki. Nah, sumber-sumber yang penting itu ada sebenarnya, yang bisa menjadi rujukan untuk mengedukate laki-laki tentang bagaimana dia bisa berperan lebih, misalnya tadi di peran-peran domestik dan reproduktif," kata dia.

Hasyim sengaja menghadirkan narasi-narasi agama yang selama ini tidak populer sebagai penyeimbang narasi selalu yang menggaungkan bahwa pengasuhan anak dan pekerjaan domestik ialah tugas perempuan. Sejumlah materi khutbah yang sudah pernah dia sampaikan, kemudian disumbangkan dalam kumpulan khutbah milik Garpu Perak.

Garpu Perak, Gerakan Mencegah Kekerasan

Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak (Garpu Perak) merupakan organisasi yang mengadvokasi laki-laki di Jawa Tengah untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Uniknya, berdirinya organisasi ini didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah.

Selanjutnya, instansi itu juga telah mengeluarkan Surat Edaran ke 35 kabupaten/kota untuk ikut menginisiasi Garpu Perak di tingkat daerah.

Dorong Pengasuhan Setara Kepada Laki-Laki Lewat Kumpulan Materi Khutbah

Saat ini, Kota Semarang telah mendirikan Garpu Perak dan mulai mengampanyekan kesadaran gender di kalangan laki-laki dewasa. Salah satunya, menggaungkan pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak melalui khutbah Jumat. Garpu Perak berkolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Semarang, FKKG Jawa Tengah, dan Yayasan Anantaka dalam merangkai kumpulan materi khutbah yang dapat dijadikan rujukan bagi para penceramah tentang praktik membina keluarga, melindungi perempuan dan anak.

Hasyim merupakan salah satu inisiator Garpu Perak yang juga pendiri Aliansi Laki-Laki Baru. Dia menilai khutbah Jumat merupakan lokasi yang strategis untuk menggaungkan pentingnya isu ini. Pasalnya khutbah Jumat dihadiri oleh seluruh laki-laki muslim dari berbagai kalangan.

"Bagi saya khutbah Jumat itu strategis ya. Karena kalau kita ingin menyasar laki-laki kan khotbah Jumat itu ruangnya. Apalagi selama ini tantangannya menurut saya, bicara tentang soal gender, soal anak soal kekerasan berbasis gender, untuk laki-laki tuh, enggak mudah," tutur dia.

Menurutnya khutbah Jumat merupakan tempat paling ideal untuk mendorong kesadaran peran laki-laki dalam pengasuhan anak dan pekerjaan domestik yang selama ini identik menjadi tugas perempuan sebagai istri dan ibu.

"Pengalaman saya menjadi khatib, sepertinya ini adalah ruang yang tersedia untuk bicara tentang ini kepada laki-laki. Jadi muncullah itu kumpulan khutbah jumat untuk isu tentang keluarga, tentang ayah, tentang anak, tentang bagaimana relasi non-kekerasan dan lain-lain," lanjut dia.

Apalagi selama puluhan tahun aktivisme yang dilakoni, Hasyim menyadari tidak mudah mendorong kesadaran laki-laki karena mereka merupakan kelompok yang diuntungkan dari ketidakadilan gender.

Dalam masyarakat patriarki, perempuan ditempatkan sebagai masyarakat kelas dua yang perlu dibimbing oleh laki-laki. Alhasil, kampanye keadilan gender yang digaungkan oleh perempuan sulit menyentuh audiens laki-laki yang seringkali merasa superior.

Oleh karena itu perlu kehadiran laki-laki untuk menggaungkan dan mengedukasi sesama laki-laki terkait isu tersebut. "Jadi itu juga sebenarnya ide kenapa laki-laki terlibat itu, laki-laki lebih akan mendengarkan laki-laki yang lain. Jadi istilahnya laki-laki mengedukasi laki-laki yang lain untuk isu-isu yang terkait dengan kesetaraan dan kekerasan, perlindungan anak dan seterusnya," lanjut dia.

Sebagai sosok yang telah mempraktikkan penyampaian kumpulan materi khutbah itu terlebih dahulu, dia tak pernah mendapat respon negatif dari jamaah. Namun dia mengakui kekurangan dari khutbah ialah komunikasi satu arah yang membuat jamaah selaku audiens tidak dapat berdiskusi.

Kendati tidak ada ruang diskusi, dia berharap muatan khotbah yang disampaikan mampu mendorong jamaahnya untuk reflektif. Sehingga tanpa adanya sesi tanya-jawab, mereka tetap bisa merenungkan hal itu.

"Problemnya enggak punya ruang dialog, itu bagian dari kelemahan, tapi bagi saya khutbah Jumat itu adalah ruang di mana isu-isu tentang kesetaraan gender bisa disampaikan kepada laki-laki, yang selama ini space-nya tidak terlalu banyak, karena untuk ngajak mereka kumpul, 'yuk diskusi gender' agak susah, maka manfaatkan ruang khas laki-laki itu," ungkap dia.

Mendorong Jamaah Memaknai Kembali Arti Pernikahan

Dalam dakwahnya, Hasyim juga mendorong jamaah memaknai kembali arti pernikahan 'sakinah' yang harusnya menghadirkan rasa aman dan nyaman, tanpa adanya ketakutan. Lalu dorongan untuk bermusyawarah dengan anggota keluarga dalam membuat keputusan.

Selain itu, dia juga menyampaikan khutbah mengenai manajemen emosi agar laki-laki dapat mengendalikan kemarahan dan tidak melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anak dan istri.

Dia memaparkan konsep anger management dalam hadist mengajarkan saat seseorang marah dalam posisi berdiri, maka duduklah. Apabila telah duduk dan masih marah, maka berbaringlah. Lalu ketika telah berbaring masih juga marah, maka ambil air wudhu dan shalat 2 rakaat.

Berdasarkan pengalaman Hasyim saat mendampingi konseling, kekerasan biasanya dimulai dengan kemarahan. Namun laki-laki selalu berpikir kemarahan terjadi begitu saja. Lalu mereka menyadari tiba-tiba istrinya sudah babak belur, perabotan rumah pecah dan lain-lain.

"Padahal sebenarnya marah itu tidak terjadi tiba-tiba, tetapi ada proses di mana kita mengenali dan mengelolanya secara positif. Ini sederhana, practical dan itu penting. Enggak (materi) perlu berat-berat dulu, seperti soal kesetaraan dan keadilan gender," tutur dia.

Topik yang dia bicarakan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mendorong laki-laki untuk berefleksi, betapa pentingnya mengelola amarah untuk mengangun relasi yang nir kekerasan dengan pasangan.

Laki-Laki Dapat Mengasuh Anak dan Mengerjakan Pekerjaan Domestik

Lebih jauh, Kompas.com berhasil mewawancarai dua orang laki-laki yang merupakan ayah muda, yakni Agus Mujiyanto (30) warga Kabupaten Banjarnegara dan Sufiyan Alwi (28) warga Kabupaten Semarang. Keduanya telah menerapkan pengasuhan setara dan pembagian tugas domestik sejak beberapa tahun silam memulai rumah tangga dengan pasangannya. Pekerjaan domestik seperti menyapu, memasak, membersihkan rumah sudah menjadi rutinitas yang lumrah dilakoni sebagai tanggung jawabnya.

"Bagi saya pekerjaan domestik merupakan tanggung jawab bersama. Bahkan 80 persen, saya yang mengerjakan, bukan untuk meringankan istri, tapi saya sadar betul bahwa ini tugas bersama sebagai keluarga," tutur Sufiyan.

Agus senada dengan Sufiyan. Tanpa hadirnya laki-laki dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan anak, rumah tangga yang harmonis akan sulit terwujud.

Menurutku itu menjadi tanggung jawab berdua. Karena kalau cuma dibebankan ke istri, itu egois banget, istri udah punya peran banyak. Kalau suami masa bodoh, istri bakalan rawan stress nanti imbasnya juga balik lagi ke rumah tangga yang kurang harmonis," ujar Agus.

Agus menyadari betul peran reproduksi sang istri sebagai ibu yang harus menyusui tidak dapat digantikan olehnya. Maka dari itu dia mengambil alih sebagian tugas domestik yang dapat dikerjakan di rumahnya.

Kendati anak laki-lakinya masih bayi, dia ingin mendidik putranya menjadi sosok yang mandiri dan menguasai kemampuan dasar untuk bertahan hidup seperti memasak dan merawat diri tanpa bergantung ke orang lain.

"Aku pengen anak juga bisa memasak, nyuci, jemur baju, atau bersih-bersih rumah, tanpa memandang gender laki-laki atau perempuan. Ini pasti berguna banget ketika anakku harus hidup sendiri, misal perantauan," lanjut dia.

Sejak awal, sosok yang kini bekerja sebagai freelance fotografer dan konten kreator mencontohkan kepada anak laki-lakinya saat dia melakukan pekerjaan domestik. Sehingga anaknya juga terbiasa melihat pekerjaan itu sebagai kemampuan yang wajib dimiliki setiap individu.

Tak jauh berbeda, Sufiyan juga telah mencontohkan langsung perannya dalam pekerjaan domestik kepada anak perempuannya yang masih berusia 2 tahun. Kini anaknya kerap ikut bermain sapu dan sebagainya.

"Saya mengajari anak tanggung jawab sederhana seperti membereskan mainannya ke dalam box setelah bermain. Saya dan istri mulai memberi contoh kepada anak, kadang saya nyapu, istri nyetrika, artinya semua tugas bisa dikerjakan bergantian. Belakangan anak ikut ambil sapu dan ikut main sapu-sapuan, intinya anak kecil melihat dan menirukan ortu," ungkap Sufiyan.

Alih-alih mendapat hujatan oleh tetangga, mereka justru diapresiasi oleh lingkungan sekitar karena menjadi laki-laki yang dapat berbagi peran. "Belum ada nyinyiran tetangga, justru malah mereka mengapresiasi karena mereka ingin seperti kami tapi belum bisa," lanjut dia.

Sejatinya, masyarakat secara umum merindukan sosok lelaki untuk hadir dan terlibat mengambil peran domestik dan pengasuhan anak. Namun dalam masyarakat patriarkis, tidak semua pasangan dalam rumah tangga dapat mewujudkan pembagian peran tersebut.

"Sependek ini aku belum dengerin nyinyiran tetangga soal aku yang pagi-pagi ngepel atau nyapu, justru tetangga berkomentar, "kamu sih mau dan bisa ngepel bersih kaya gitu, suamiku boro-boro bantuin"," imbuh Agus.

Kedua ayah itu meyakini peran mereka dalam pengasuhan akan membentuk karakter dan kepribadian anak saat dewasa. Sehingga anak harus mendapat cukup kasih sayang untuk dapat tumbuh dengan baik. Tak jarang, Sufiyan yang merupakan pedagang toko kelontong di kampungnya mengajak anak berbelanja ke pasar, memandikan anak, dan mengajaknya bermain sambil menjaga toko.

Dia tidak keberatan dengan beban pengasuhan yang diampu karena istri harus mengajar di sekolah. "Peran ayah sangat penting dan enggak boleh kosong, ayah dan ibu harus saling membantu dalam pekerjaan rumah dan mengasuh anak, karena ini berkaitan dengan kondisi mental anak saat dewasa," tandas Sufiyan.

Kampanyekan Pengasuhan Setara dan Keluarga Anti-Kekerasan

Terpisah, Ketua DMI Kota Semarang, Ahmad Fuad berencana membagikan buku kumpulan materi khutbah tersebut ke seluruh masjid di Semarang. Namun buku itu masih dalam proses percetakan. Sehingga distribusi masih dilakukan secara terbatas dalam bentuk e-book.

"Distribusi melalui pengurus cabang DMI Keamatan se-Kota Semarang. Untuk mengajak para penceramah melalui takmir masjid, menyampaikan ke khotib untuk memakai materi itu dalam khutbah Jumat," ujar Fuad.

Hasyim menyebut kolaborasinya itu menempatkan DMI Kota Semarang sebagai aktor kunci karena forum itu menjadi tempat berkumpul takmir masjid di Kota Semarang, termasuk para imam dan khotib di dalamnya.

Ahmad Fuad yang merupakan salah satu anggota Garpu Perak Kota Semarang sengaja memanfaatkan platform yang dimiliki untuk mengadvokasi sesama lelaki melalui jalur khutbah agama.

Sebelum mendistribusikan kumpulan materi khutbah tersebut, Fuad sempat mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang pengasuhan anak dan pencegahan KDRT. Pesertanya ialah seluruh pengurus DMI hingga tingkat kelurahan yang mayoritas takmir masjid.

"Nah, itu kan ruang-ruang yang selama ini gak tersentuh ya untuk bicara tentang ini, maka itu menjadi kesempatan dan ruang yang terbuka untuk bicara tentang tema-tema ini," imbuh Hasyim yang menjadi pemateri FGD.

Garpu Perak sempat menyerahkan kumpulan materi khutbah itu kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelumnya, Bintang Puspayoga saat berkunjung ke Semarang 2024 lalu. Tak kalah penting, Garpu Perak, Yayasan Anantaka dan Dinas Pendidikan Kota Semarang juga menginisiasi kampanye #AyahBerperan yang mempopulerkan peran ayah dalam mengambil raport anaknya ke sekolah di akhir semester pada Desember 2024 lalu.

Meski dianggap sederhana, tagline Kerasan di Rumah yang melibatkan laki-laki dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan anak dinilai mampu meng-counter urusan mengambil raport yang selama ini diurus ibu. "Maka menjadi penting, enggak ada yang salah dengan laki-laki mengambil raport. Bahkan memberi value, memberi nilai, bahwa kehadiran ayah di dalam proses intelektual anak, akademik anak, yang juga di dalam konteks mengenalkan bahwa peran ayah itu enggak hanya soal bayar uang sekolah selesai," tegas Hasyim.(*)

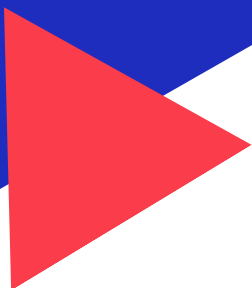
Artikel ini dimuat tanggal 17 Februari 2025

Tautan Artikel:

<https://s.id/GarpuPerakGaungkanPeranAyahdalamPengasuhan>



2



► 02. Perempuan, Desa dan Kerja-Kerja Perawatan yang Luput Dibicarakan

Rizal Kurniawan, kolomdesa.com

Kolomdesa.com, Bandung - Mulai dari mengurus bank sampah, menjadi kader posyandu, menyiapkan rumah aman, bertugas sebagai wali kelas lansia, hingga mengelola greenhouse, perempuan di Desa Mandalahaji, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, memegang peran penting dalam merawat masyarakat.

Saya berkesempatan bertemu salah satu dari perempuan hebat di desa ini, Ibu Dewi, bersama rekan-rekannya pada 28 Januari 2025, Minggu pagi. Desa Mandalahaji terletak di dataran tinggi pegunungan Bandung Selatan, berjarak sekitar 33 KM dari bilangan paling sibuk se-Bandung Raya: Braga CityWalk.



Dewi (paling kanan) bersama rekan-rekannya berpose di depan kantor posyandu.

Sumber: dokumentasi kolomdesa.com

Tiga hari sebelum kedatangan, lewat komunikasi udara, perempuan 49 tahun tersebut sudah menyanggupi untuk menemani saya ke tempat Bank Sampah yang ia kelola dan hidupi bersama sejumlah perempuan desa sejawatnya. Bangunan gubuk kayu yang didirikan secara kolektif dan swadaya itu berada di atas tanah pinjaman dari seorang dermawan. Dengan kata lain, sewaktu-waktu, tanah itu dapat kapan saja diambil kembali jika sang pemilik membutuhkan.

“Kebutuhan paling mendesak Bank Sampah kami hari ini adalah lahan. Semuanya mungkin bisa kami inisiasi dengan gotong royong, namun lahan yang mahal sepertinya adalah hal yang mustahil dapat kami atasi sendiri,” tutur Dewi saat perjalanan dari rumahnya menuju Bank Sampah.

Sesampainya di lokasi Bank Sampah Mandiri, sudah ada lima perempuan duduk melingkar yang terlihat teliti dan cermat memilah sampah. Mana yang punya nilai ekonomis dan dapat dijual kembali, mana yang residu dan harus dibakar.

Kelimaanya adalah Tuti Karwati (38 tahun) yang juga menjadi sekretaris, Cici (39), Eulis Yati (44), Ayi Komariyah (53) dan Widia (21). Ayi merupakan anggota tertua dari Bank Sampah, sedangkan Widia adalah anggota termuda. Artinya, Bank Sampah Mandiri dikelola oleh sejumlah perempuan dengan kelompok usia yang cenderung berbeda-beda.



Dewi dan rekan-rekannya sedang melakukan aktivitas di Bank Sampah Mandiri, Desa Mandalahaji.

Sumber: dokumentasi kolomdesa.com

Setidaknya tiga kali dalam seminggu para perempuan di Bank Sampah Mandiri memilah sampah. Mereka juga mendatangi rumah-rumah para nasabah (sebutan untuk masyarakat yang menggunakan jasa perawatan dari Bank Sampah Mandiri), untuk mencatat, memberi estimasi harga sekaligus mengumpulkannya di satu titik untuk memudahkan dua petugas laki-laki yang lain mengambil sampah tersebut sekali seminggu.

Mereka bekerja mulai pukul sembilan pagi hingga satu siang. “Bisa dikatakan, per hari ini kami bekerja secara sukarela sama halnya ketika di posyandu. Pendapatan yang tak seberapa dari Bank Sampah untuk sementara hanya cukup untuk biaya operasional saja,” terang Dewi.

Nasabah Bank Sampah Mandiri, yang sekarang berjumlah 44, menabung sampah, yang uangnya bisa diambil minimal sebulan sekali. Semua jenis sampah yang dapat didaur ulang ditampung terlebih dahulu dengan sistem menabung, termasuk kardus, gelas dan botol plastik. Hanya saja, kata Dewi, beberapa nasabah ada yang langsung meminta cash.

Dewi mengatakan, per kilogram sampah dari nasabah dibanderol dengan harga Rp. 2000. Harganya fluktuatif dan bisa naik turun, tergantung kondisi. Namun, terkadang, beberapa nasabah memilih menjual ke pengepul lain karena bisa mendapatkan harga yang lebih bagus.

“Sering sekali waktu penjemputan, ternyata sampah-sampah dari nasabah sudah dijual ke pengepul lain. Kami kalah cepat. Ya gimana lagi, kami juga tidak bisa melarang mereka. Kerja kami ini kan kerja untuk saling mengerti dan memahami,” terang Dewi.

Berdiri pada tahun 2023 atas inisiasi kelompok perempuan yang sebelumnya juga aktif di kegiatan posyandu, Bank Sampah Mandiri resmi dibentuk. Mandiri adalah sebuah akronim dari ‘Mandalahaji Bersih dan Asri’. Taglinenya adalah: Rubah [sic] Sampah Jadi Berkah.

Saat saya berkunjung, Bank Sampah Mandiri genap berusia dua tahun. Para perempuan itu merayakannya dengan makan singkong dan kacang rebus bersama di kantor Posyandu, se usai menyelesaikan aktivitas di Bank Sampah.



Bangunan gubuk kayu Bank Sampah Mandiri. Sumber: dokumentasi kolomdesa.com

Kerja Perawatan dan Beban terhadap Perempuan

Apa yang dilakukan Dewi dan teman-temannya di posyandu dan bank sampah sebelumnya hingga hari ini adalah jenis kerja perawatan tak berbayar.

Indonesian Labour Organization (ILO) mendefinisikan kerja perawatan sebagai aktivitas atau pekerjaan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, -dan emosional orang dewasa dan anak-anak, tua dan muda, lemah dan berbadan sehat, bayi baru lahir, orang tua, orang dengan disabilitas, yang membutuhkan perlindungan, perawatan, atau dukungan. Bahkan orang-orang yang sehat dan pula yang bekerja.

Kerja perawatan bisa dibayar atau tidak dibayar, dilakukan di dalam rumah tangga atau di luar rumah, dan berkontribusi signifikan pada ekonomi. Kerja-kerja perawatan masih didominasi oleh perempuan, sementara kerja perawatan tak berbayar, masih dianggap sebagai tugas perempuan. Alih-alih melihat yang mereka lakukan sebagai pekerjaan yang memiliki nilai ekonomi, Dewi dan teman-temannya memandang ini sebagai pengabdian.

Ini bukan pertama kali Dewi dan para perempuan lain pengurus Bank Sampah mendedikasikan waktu dan tenaga mereka untuk kerja kemasyarakatan di desa mereka. Sebelumnya mereka juga aktif sebagai kader posyandu, dan beberapa kegiatan lainnya.

“Justru karena ini berawal dari kelompok posyandu, kita sudah tahu karakter masing-masing. Jadi ini aja yang aktif, kalau di luar ini saya tidak bisa menjamin. Sulit kan cari orang yang benar-benar tulus, ikhlas dan semangat. Apalagi ini kerja yang tidak ada bayarannya,” urainya.

Di Indonesia tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di pekerjaan formal masih lebih rendah daripada laki-laki. Salah satu penyebabnya adalah norma gender yang masih membebankan kerja-kerja perawatan pada perempuan sehingga mempertajam kondisi ketimpangan gender.

Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan, Abby Gina Boang Manalu mengatakan bahwa kerja perawatan memang masih didominasi oleh perempuan, tidak hanya di desa, melainkan juga di perkotaan.

“Dalam sejarah kerja manusia, pada mulanya perempuan difokuskan pada kerja yang bersifat ke dalam (domestik), sementara laki-laki melakukan kerja-kerja ke luar atau yang menghasilkan barang dan memiliki nilai ekonomi. Dari sana ada pembagian tugas yang mulai ketat dan dianggap sebagai natural bahwa perempuan bertugas untuk melakukan kerja perawatan atau yang biasa kita sebut sebagai kerja reproduksi, sementara laki-laki lebih difokuskan kerja-kerja produktif yang menghasilkan nilai ekonomi, keuntungan dan lain sebagainya,” tuturnya saat saya wawancarai seusai bedah majalah Jurnal Perempuan edisi 118 di salah satu kafe di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, (30/01/2025).

Padahal seharusnya, lanjut Abby, pada dasarnya kerja perawatan adalah kemampuan paling dasar yang selayaknya dimiliki semua orang, tidak hanya perempuan. Tetapi dikarenakan budaya pembagian kerja berdasarkan gender tersebut, ada pelanggaran atau normalisasi bahwa kerja perawatan adalah tugas perempuan.

“Jika dalam konteks masyarakat desa, yang menjadi pembeda menurut saya adalah akses terhadap pengetahuan dan informasi. Atau pola kebudayaan patriarkinya yang masih kuat, sehingga masih minimnya ruang kritik dan terus dilanggengkan begitu saja. Sementara masyarakat urban atau perkotaan situasi pendidikannya berbeda, akses informasi melimpah sehingga membuat pemahaman masyarakat menjadi lebih baik dan melahirkan anggapan bahwa kerja perawatan adalah kerja bersama atau kolektif,” ujarnya.

Abby menegaskan, diperlukan penghargaan terhadap kerja-kerja perawatan untuk mengubah cara berfikir yang sudah mengakar pada masyarakat. Kebijakan yang berpihak dapat mendorong transformasi sosial, juga mengubah paradigma.

“Misalnya, perjuangan dan pengawalan kebijakan terhadap RUU PRT yang masih belum disahkan. Dan juga, tidak hanya pekerja rumah tangga yang terabaikan, tetapi juga guru PAUD dan lain-lainnya, semuanya hampir dibayar secara sukarela. Karena tadi, dianggap sebagai bukan pekerjaan,” pungkasnya.

Selain memang belum banyak yang faham dan mengenal, isu ini hanya sesekali muncul secara sporadis di permukaan, belum mendapat atensi khusus di luar agenda Beijing Platform 30+ yang digelar di Bangkok (21/11/2024) tahun lalu. Pun, dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran yang berkait dengan kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan, isu ekonomi perawatan baru saja dimasukkan dalam rancangan awal atau peta jalan RPJMN 2024-2045- meski sampai 100 hari pemerintahannya rencana prioritas kerja sampai saat ini belum menyinggung sama sekali isu ekonomi perawatan ini.

Padahal, inisiatif maupun aktivitas perawatan berbasis masyarakat di daerah pedesaan seperti yang dilakukan Dewi memberi kontribusi yang sangat penting dalam berbagai aspek.

Sebelum terjun ke Bank Sampah, Dewi juga sempat menjabat ketua Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) Melati 17 sejak 2015. Sudah 10 tahun ia mengabdikan diri dan melakukan kerja perawatan di sana.

“Saya dulu sempat aktif, tahun 2000-an sudah pernah jadi kader tapi tidak lama, cuma sebentar, terkendala kesibukan. Karena kalau jadi Kader Posyandu itu kan harus siap setiap saat, sedangkan saya banyak kebutuhan. Daripada saya tidak dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya mending berhenti,” ujarnya.

Posyandu adalah salah satu contoh kerja perawatan penting yang dilakukan perempuan untuk merawat komunitas mereka tanpa bayaran. Relawan yang menjadi Kader Posyandu, biasanya masyarakat setempat, membantu pelayanan kesehatan di Posyandu. Tugas para relawan ini mendukung program kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, serta pencegahan penyakit dengan mendapatkan pelatihan dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas setempat.

Peran mereka sangat penting dalam mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, terutama di desa atau daerah terpencil. Meski berbasis kerelawanan dan lazimnya sudah ada jadwal pelayanan, para kader posyandu, harus siap setiap saat ketika ada masyarakat yang membutuhkan.

“Pas 2015 saya terjun lagi karena suami dipilih jadi ketua RW. Memang tidak harus, namun saya tergerak. Ada semacam tanggung jawab moral. Awalnya saya agak tidak mempedulikan, toh suami saya yang RW bukan saya. Tapi seiring berjalannya waktu saya mau,” katanya.

Dewi bercerita, di awal-awal menjadi ketua Posyandu Melati 17, masyarakat masih belum acuh pada pelayanan Posyandu. “Pas awal-awal masyarakat belum terpercayanya. Kita sosialisasi terus menerus, memang menumbuhkan mindset baru perlu waktu panjang,” ujarnya.

Waktu berselang, lanjut Dewi, kesadaran masyarakat makin tumbuh. “Mulai dari sosialisasi di pengajian, lewat obrolan-obrolan santai ketika secara tak sengaja bertemu di pasar atau di jalan. Tidak melulu acara resmi. Pesan-pesan terkadang lebih meresap dan lebih mudah diterima dalam obrolan-obrolan santai di luar suasana formal,” terangnya.

Sebagai istri ketua RW, ibu dua anak ini juga membuka pintu rumahnya 24 jam untuk menjadi sebuah Rumah Aman Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).



Potret depan Bank Sampah mandiri Desa Mandalahaji. Sumber: dokumentasi kolomdesa.com

Guru Besar Sosiolog Pembangunan Desa Institut Pertanian Bogor, Sofyan Sjaif berpendapat bahwa masih ada segmentasi dalam area kerja yang terjadi di desa-desa, dalam hal ini termasuk juga kerja perawatan.

“Biasanya perempuan bekerja di ranah-ranah yang lebih soft (domestik) sementara aktivitas berat atau produksi masih didominasi laki-laki, meski di dalam satuan aktivitas produksi tadi ada pembagian kerja,” urai pencetus Data Desa Presisi (DDP) tersebut saat saya wawancarai, Rabu, (05/02/2025) di Kebun Merdesa, Dramaga, Bogor.

Sofyan mencatat, melalui survei dalam DPP yang berbasis sensus, spasial dan partisipatif, fenomena di atas terjadi jika status kepala rumah tangganya adalah laki-laki. Tetapi jika yang menjadi kepala rumah tangga adalah perempuan biasanya akan lahir alternatif, dengan kata lain, pembagian kerja yang bersifat keras atau lembut tidak berlaku.

“Membicarakan pedesaan erat kaitannya dengan kondisi sosio-budaya dan kulturalnya. Masing-masing punya tradisi, ada semacam ikatan nilai, norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Itu masih mengakar, meskipun nanti saya kira ada proses pergeseran yang akan terjadi. Kemajuan teknologi akan banyak mengubah ke depan, termasuk segmentasi kerja,” papar Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB tersebut.

Selain Posyandu, Dewi juga menjadi salah satu wali kelas “Sekolah Lansia”. Sebuah program perawatan yang memberi edukasi seputar kesehatan, keterampilan dan pola hidup kepada para lansia di Desa Mandalahaji. Per hari ini, peserta Sekolah Lansia berjumlah 53 orang dan berasal dari beragam RW.

“Sebenarnya banyak yang berminat dan mendaftar, hanya saja dananya terbatas sebab sekolahnya gratis. Semua relawan dan pengelolanya juga tidak mendapat bayaran sama sekali,” urai Dewi.

Selain itu, Dewi dan teman-temannya yang berada di kepengurusan Bank Sampah juga tergabung dalam program kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani adalah perkumpulan ibu-ibu yang dibentuk oleh pihak desa untuk mengelola green house dan mengedukasi masyarakat terkait pemanfaatan lahan.

“Dari pembibitan sampai penanaman berbagai tanaman sayuran, kita ditugasi untuk mengedukasi masyarakat agar setiap keluarga dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya untuk ditanami tanaman-tanaman yang bermanfaat. Baik untuk dikonsumsi atau dibuat obat tradisional,” ungkapnya.

Kesadaran Ekologi Perempuan Desa dan Peluang Ekonomi Perawatan

Wheny Putri, Tenaga Ahli Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung sekaligus fasilitator pendirian Bank Sampah Mandiri mengatakan, Mandalahaji terpilih sebagai salah satu desa untuk dilakukan kajian Desa Tematik dari program ‘Bandung Bedas Manunggal’--sebuah tajuk dari Bupati Bandung Dadang Supriatna.

“Kawasan tematik adalah suatu konsep kawasan dengan tema tertentu yang spesifik, memiliki ciri khas dan karakter wilayahnya. Salah satu faktor pemilihan Tematik Desa adalah angka IDM yang masih rendah, tahun 2022 status Desa Mandalahaji masih berkembang. Juga masih di bawah rata-rata IDM Provinsi Jawa Barat, maka diperlukan intervensi langsung dari pemerintah,” urainya saat saya hubungi via telepon, (26/01/2025).

Setelah dilakukan kajian tematik, Wheny melanjutkan, ditemukan 13 isu strategis yang ada di Desa Mandalahaji. Salah satu isu yang mengemuka, laten dan harus segera ditangani adalah sampah.

“Tahun 2022, di Desa Mandalahaji belum ada tempat pengelolaan sampah. Sampah dari aktivitas rumah tangga maupun pertanian hanya dibakar, ditumpuk di jalan, bahkan berserakan di selokan, sehingga cukup beresiko dalam menimbulkan dampak lingkungan. Oleh sebab itu, kami mengajak teman-teman dari posyandu yang saat itu diketuai Bu Dewi untuk sama-sama mendirikan Bank Sampah,” ungkapnya.

Selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, tambah Wheny, dibentuknya Bank Sampah Mandiri juga sebagai harapan menciptakan peluang ekonomi dari kerja-kerja perawatan yang selama ini tak pernah dianggap penting.

“Beberapa kali kita lakukan pertemuan, diskusi dan juga melakukan studi tiru di Bank Sampah Barokah Desa Wangisagara. Bu Dewi dan teman-teman bersemangat dan yakin bisa mengadopsi cara mereka, maka saya juga ketularan semangat, ikut membantu dan mempersiapkan apa saja yang diperlukan,” jelas Wheny.

Di awal-awal, Wheny mengaku tak mudah mengatasi hambatan yang ada. Seperti meyakinkan pihak pemerintah desa dan proses mengedukasi masyarakat.

“Di beberapa keadaan, pihak pemerintah desa kan kadang harus diperlihatkan bukti dulu baru mau menyetujui dan mendukung. Jadi, kami berkomitmen untuk membuktikan tekad saya, Bu Dewi dan teman-teman yang lain,” ungkapnya.

Sama dengan Dewi, Wheny juga masih percaya bahwa Bank Sampah Mandiri di Desa Mandalahaji bisa terus tumbuh dan berkembang, serta menghasilkan peluang ekonomi dari kerja-kerja perawatan yang dilakukan.

“Jika posyandu adalah kerja perawatan yang dilakukan dalam urusan kesehatan, maka Bank Sampah adalah kerja-kerja perawatan untuk lebih mempedulikan lingkungan,” ujarnya memungkasi pembicaraan.

Mendengar cerita-cerita menggugah hati dari Dewi dan Wheny soal kesuksesan Bank Sampah Barokah di Desa Wangisagara, saya memutuskan mengunjungi desa yang berjarak 6.5KM dari Desa Mandalahaji tersebut.

Sebelum menuju lokasi, saya sudah berkomunikasi dengan Apong Ningrum, juga salah satu orang yang aktif mendampingi Bank Sampah Barokah. Saya mendapat nomornya dari Wheny.

Di sana saya bertemu dengan Apong Ningrum, 53, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Wangisagara yang juga mendampingi Bank Sampah Barokah. Sejak 2007, Apong sudah aktif di lingkungan pemerintahan desa, ia seperti sudah tahu betul kondisi sosio-kultur masyarakat Wangisagara.

“Bank Sampah Barokah Wangisagara berdiri secara resmi tahun 2021. Ada dua motif yang melatarbelakangi pendirian bank sampah ini. Pertama, menjaga lingkungan. Kedua, menciptakan kemandirian ekonomi. Jadi sistemnya warga nabung sampah di kita, daripada dibuang cuma-cuma. Kebetulan Desa Wangisagara penduduknya banyak dan padat, ada 423 KK kurang lebih, jadi itu dilihat sebagai peluang,” terangnya.

Sebenarnya, lanjut Apong, upaya merawat lingkungan yang dilakukan masyarakat desa yang termasuk wilayah Kecamatan Majalaya itu sudah digalakkan sejak tahun 2017. Namun baru mulai benar-benar terstruktur ketika tahun 2021 atau ketika mendapat predikat Kampung Bersih dan Sehat.

“Kita bikin rencana aksi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat sampai mengerti. Bahkan, kita juga menyusun peraturan desa (perdes) tentang setiap pasangan suami istri yang mau menikah harus menanam minimal satu pohon di desa. Juga setiap rumah diwajibkan memiliki dua lubang cerdas organik. Kita tidak tau 2045 air di dalam tanah masih ada atau ngga, kan?” tegasnya. Saya terbelalak.

Hingga hari ini, komunitas Bank Sampah Barokah Desa Wangisagara beranggotakan 68 orang, termasuk 45 perempuan dan 23 laki-laki, serta 423 nasabah. Artinya, semua warga Desa Wangisagara menikmati kerja perawatan yang dilakukan Bank Sampah Barokah.

“Semua warga ikut semua. Bahkan dari desa-desa lain, seperti Desa Mandalahaji kan kita yang mengepul sampahnya. Bisa dikatakan itu rintisan kita. Jadi kalau warga solid kan pengepul lain bukan jadi persoalan. Dari hasil dari menabung sampah, beberapa ada yang bisa dibuat bayar BPJS, tagihan listrik dan lain-lain. Setiap tahun juga kita memberi reward untuk penabung terbanyak dan rumah terbersih,” terang Apong.

Apong mengatakan selain memberi edukasi dan mengubah mindset masyarakat yang sebelumnya belum terbuka, dukungan dari pihak pemerintah desa juga sangat mempengaruhi keberlangsungan sebuah program.

“Semua stakeholder di sini saling membantu dan bahu membahu. Karang Taruna di sini juga aktif. Kita juga mendapat anggaran 6 juta setiap tahun dari Dana Desa. Bahkan kita sudah bisa menggaji anggota bank Sampah mulai Rp 400 ribu - Rp. 1.2 juta, tergantung seberapa besar tanggung jawabnya. Pemerintah desa kami berkeyakinan, sesulit apapun dan selama untuk kemajuan masyarakat, kenapa tidak?” tandasnya.

Ini tentu sangat kontras dengan kondisi Bank Sampah Mandiri, yang untuk menutup biaya operasional saja masih kesulitan.

Dalam kerangka global, ekonomi perawatan memiliki lima kerangka atau yang kerap diistilahkan sebagai 5R. Pertama, pengakuan terhadap pekerjaan perawatan (recognize). Kedua, memastikan bahwa kerja perawatan dibayar dengan layak (reward). Ketiga, pengurangan beban perempuan dalam kerja perawatan serta mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender (reduce). Keempat, mendistribusikan kerja perawatan (redistribute). Kelima, pekerja perempuan dan pekerja perawatan memiliki suara dalam membuat kebijakan (represent).

Linda Dwi Eriyanti, pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember mengatakan, ada dua cara melihat fenomena kerja perawatan. Yang pertama, melihat kerja perawatan dari perspektif ekonomi. Kerja perawatan seharusnya tidak dipandang sebagai kerja reproduktif, atau kerja yang tidak menghasilkan materi sehingga dianggap tidak bernilai ekonomi.

“Dampak dari cara berpikir seperti ini akhirnya menganggap perempuan yang melakukan kerja keperawatan di rumah tidak produktif, sehingga dia perlu didorong untuk bekerja di ruang publik yang ‘lebih produktif dan bernilai ekonomi’, dengan kata lain bergaji.”

Kerja yang dianggap reproduktif seharusnya dihargai dan dihitung secara materi.

“Bayangkan kalau pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai kerja-kerja produktif, berapa kontribusi para perempuan dengan kerja perawatan itu berkontribusi terhadap pendapatan negara? pastinya sangat besar,” tulis perempuan yang juga menjadi Ketua Pusat Studi Gender Universitas Jember tersebut saat saya mintai pendapat melalui Whatsapp, Sabtu (01/02/2025).

Cara pandang yang kedua, lanjut Linda, melihat bahwa kerja keperawatan identik dengan perempuan dan "femininitasnya".

Hal tersebut akhirnya dapat berdampak kepada pengkotakan perempuan pada sektor tertentu. Menurut Linda, perlu perubahan pola berpikir bahwa kerja perawatan itu bisa dan harus dilakukan oleh semua orang, baik laki-laki maupun perempuan.

"Femininitas bukanlah kodrati, tetapi hanya berupa skill dan aktivitas yang bisa diajarkan dan dipraktikkan semua orang. Maka seharusnya ada kebijakan yang mendorong semua orang untuk berperan secara sama dan setara di dalam rumah, maupun di ruang publik."

"Dalam keluarga, urusan pengasuhan anak, merawat orang tua, merawat anggota keluarga yang sakit, seharusnya dilakukan bersama oleh laki-laki dan perempuan. Demikian juga profesi perawat, asisten rumah tangga, pengelola rumah jompo, dan jenis-jenis pekerjaan perawatan di ruang publik sudah harus menjadi profesi netral gender yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan," tandasnya.

Ibarat gunung es, kerja perawatan merupakan kerja yang menopang sistem sosioekonomi kita. Kerja perawatan lah yang memungkinkan kerja-kerja lainnya untuk terus dan tetap berjalan. Ini mengapa ekonomi perawatan perlu diarusutamakan untuk menghargai kerja perawatan sebagaimana kerja lainnya.

Bahwa kerja perawatan tidak berbayar sama pentingnya dengan kerja berbayar, dan untuk itu perlu diakui dan didukung pada tataran institusional; dan kebijakan selayaknya kerja berbayar lainnya.(*)

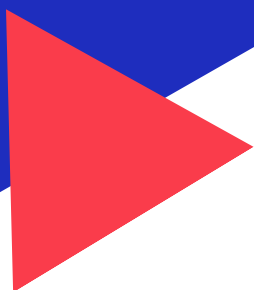
Artikel ini dimuat tanggal 19 Februari 2025

Tautan Artikel:

<https://s.id/PerempuanDesadanKerjaKerjaPerawatan>



3



► 03. Posyandu Lansia: Lebih dari Sekadar Tempat Kumpul, Ini Soal Gizi, Kesehatan Hingga Ekonomi Perawatan

Lidya Salmah, Tribun-Papua.com

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA- Posyandu sudah dikenal sebagai pusat layanan kesehatan untuk bayi dan balita, namun tidak banyak yang tahu bahwa posyandu juga melayani kebutuhan lansia

Dengan mendapatkan perhatian terhadap gizi, kesehatan, dan ekonomi, lansia dapat hidup lebih sehat, produktif, dan bahagia.

Pelayanan kesehatan dan gizi yang baik di posyandu, lansia juga dapat terhindar dari penyakit yang lebih serius dan meminimalisir biaya pengobatan yang lebih besar.



POSYANDU KHUSUS LANSIA- Tampak suasana pelayanan Posyandu bagi lansia yang belum memiliki tempat khusus di Kelurahan Argapura, Distrik Kota Jayapura, Papua.

Foto: Tribun-Papua.com/Lidya Salmah.

Selain itu, posyandu lansia juga dapat menjadi wadah bagi lansia untuk mengembangkan keterampilan.

Kota Jayapura juga memiliki Posyandu Lansia, namun sayangnya masih berada dalam satu atap dengan dengan Posyandu Bayi Balita.

Hal ini membuat layanan yang dibutuhkan lansia menjadi tidak optimal, dan masih banyak yang susah mengakses layanan tersebut.

Sebuah Posyandu Lansia khusus yang terpisah dari posyandu bayi dan balita tidak hanya akan membantu para lansia, namun juga orang-orang yang merawat mereka (caregiver), salah satunya Yosina Petronela Sibi (40).



CAREGIVER- Yosina Petronela Sibi, warga Argapura yang merawat sang ibu lansia.

Foto: Tribun-Papua.com/Lidya Salmah

Yosina, warga Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua ini, harus berbagi waktunya sebagai pegawai Kantor Kelurahan Argapura dengan merawat ibunya, Maria Yawan, 72 tahun.

"Kalau rawat orang tua yang sudah usia lanjut seperti mama ini, memang agak susah-susah gampang. Tapi namanya orang tua sendiri (kandung), saya pikir tidak membatasi saya punya pekerjaan, karena itu kewajiban kita sebagai anak untuk merawat orang tua, jadi tidak ada kendala bagi saya merawat mama selama ini," tutur Yosina sambil tersenyum, belum lama ini.

Di usia senjanya, kata Yosina, Maria harus berhadapan dengan masalah kesehatan yang tak mudah.

Suatu ketika, Maria terjatuh dan insiden itu ternyata membawa pengaruh besar pada tulang belakang serta pinggulnya.

"Kalau mama kendala sering sakit itu kaki karena mama dulu waktu masih muda pelayanan di Paniai sempat ada jatuh. Ya, pengaruh dari situ tulang belakang mama, bagian ekor dari pinggul itu yang pengaruh," jelas Yosina.

Di tengah perjuangan Yosina merawat ibunya, ada satu harapan besar yang ia titipkan kepada Pemerintah Kota Jayapura.

Ia berharap agar pemerintah dapat membangun Posyandu khusus lansia di wilayahnya, yakni Kelurahan Argapura.

"Saya harap itu butuh sekali karena itu yang membantu lansia yang ada di kelurahan Argapura ini, karena kita tidak perlu bawa mama jauh-jauh pergi pelayanan kesehatan," akunya.

"Karena biasanya pelayanan Posyandu Lansia di sini tidak menetap, kadang di RT sini, lalu kemudian lain waktu ada lagi di bagian lainnya," imbuhnya.

Menurut Yosina, keberadaan posyandu lansia akan sangat membantu para lansia dan keluarga seperti dirinya. Sebab, selama ini, para lansia di wilayahnya masih kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan karena tempatnya yang berpencar.

"Ya kalau bisa ada satu titik yang pas ditempatkan untuk Posyandu Khusus lansia di Kelurahan Argapura sini, jadi kita sudah tahu tempatnya dan tidak membuat orangtua kami bingung mau ke mana saat pelayanan lansia,"terang Yosina.

Yosina menambahkan, posyandu lansia juga dapat menjadi wadah yang lebih baik untuk para kader kesehatan dalam memberikan informasi dan pendampingan kepada lansia. Ia melihat selama ini informasi terkait kesehatan lansia juga masih belum tersampaikan dengan baik.

"Ya, harus ada program tertentu untuk lansia, tapi saya pikir kalau ada Posyandu Khusus Lansia itu bagus, dan semua akan lengkap di sana,"bebernya.

Lebih lanjut, Yosina berharap agar kepala daerah yang baru (Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura terpilih) dapat memberikan perhatian lebih kepada para lansia.

Karena menurutnya, perhatian kepada lansia adalah kunci kesejahteraan sebuah keluarga.

"Mungkin dengan adanya kita punya bapak wali kota yang baru mungkin ada program yang lebih mantap lagi buat kita punya mama-mama para lansia ke depannya itu biar lebih diperhatikan. Karena mereka ada makanya anak-anak ada, dan dengan perhatian lewat membangun Posyandu Khusus Lansia itu bisa membantu para lansia khususnya di Kelurahan Argapura," tandas Yosina.

Kami Butuh Posyandu Khusus!



LANSIA BUTUH POSYANDU KHUSUS- Maria Yawan, lansia yang bermukim di Kelurahan Argapura, Kota Jayapura, Papua, berharap Pemkot Jayapura membangun posyandu khusus lansia di wilayahnya. Foto: Tribun-Papua.com, Lidya Salmah.

Maria sendiri menaruh harapan bahwa posyandu khusus tersebut akan memberi pelayanan kesehatan dan perhatian yang layak kepada para lansia seperti dirinya.

"Selain mendapatkan pelayanan kesehatan, kami bisa berkumpul dengan sesama lansia, ya pokoknya bermanfaat positif," ujar Maria.

"Puji Tuhan karena saya kan hamba Tuhan, saya masih memberikan pelayanan walaupun kondisi saya seperti ini, kaki saya sakit. Tapi berkat Tuhan selalu melimpah. Jemaat selalu perhatikan, dari sinode malahan juga membantu saya," tutur Maria dengan penuh syukur.

Lanjutnya, "Jadi kita sudah tidak ke mana-mana lagi, harus ke sana dan ke sini seperti posyandu lansia yang saat ini masih belum punya tempat. Nah, kalau ada tempat khusus, bangunan khusus di satu tempat yang kita sudah tahu, ya kita bisa ke sana setiap kita butuhkan".

Lebih jelas, Maria ingin melihat adanya tempat khusus bagi lansia, di mana mereka dapat berkumpul, berinteraksi, dan mendapatkan perhatian yang lebih intens.

"Saya rasa saya sudah tidak bisa karena saya punya badan ini tidak sanggup jalan ke sana kemari," ujarnya.

Dengan adanya Posyandu Khusus Lansia juga berdampak kepada anak-anak yang selama ini merawat orangtuanya.

"Apalagi untuk anak-anak yang sangat sibuk, kalau sudah ada Posyandu Khusus Lansia, mereka (anak-anak) tidak lagi direpotkan oleh orangtuanya," ujarnya.



POSYANDU KHUSUS LANSIA- Christin Aufelda (kanan) dan Margaretha Fonataba kader posyandu di Kelurahan Argapura. Foto: Lidya Salmah.

Lansia Butuh Perhatian Lebih dari Sekadar Pemeriksaan

Menurut kader posyandu lansia di Kelurahan Argapura, Christin Aufelda, dengan keberadaan Posyandu Khusus Lansia, maka memungkinkan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang lebih fokus dan sesuai dengan kebutuhan lansia. Apalagi, jumlah lansia di Kelurahan Argapura mencapai sekitar 300 orang.

"Dan kegiatan seperti ini tentunya tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan sosial lansia,"paparnya.

Dengan mendapatkan pelayanan kesehatan dan gizi yang baik di posyandu khusus, maka lansia dapat terhindar dari penyakit yang lebih serius dan meminimalisir biaya pengobatan yang lebih besar.

"Posyandu lansia juga dapat menjadi wadah bagi lansia untuk mengembangkan keterampilan dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka,"terangnya.

Lebih jelas kata Christin, bahwa perhatian terhadap lansia sangatlah penting, mengingat banyaknya kekurangan yang mereka hadapi seiring bertambahnya usia.

Ia pun menyoroti masalah kesehatan yang seringkali menghampiri lansia, serta keterbatasan aktivitas yang membuat mereka membutuhkan bantuan orang lain.

"Kalau menurut saya sangat penting karena lansia ini punya banyak kekurangan. Di saat umur 60 ke atas pasti banyak sakit terus aktivitas mereka juga tidak bisa sendiri, harus ada yang bantu. Jadi pemerintah harus benar-benar memberikan perhatian pada lansia ini," tutur Christin dengan penuh kepedulian.

Selama ini, Christin dan kader posyandu lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para lansia di Kelurahan Argapura, dengan cara berkeliling dan melakukan kegiatan bersama posyandu balita.

Sebab itu, ia berharap agar Pemkot Jayapura dapat menyediakan tempat atau wadah khusus bagi lansia untuk berkumpul dan mendapatkan perhatian yang lebih intens.

"Harapan saya pemerintah harus kalau bisa turun langsung ke lapangan karena selama ini yang turun bersama kita itu pihak puskesmas. Kalau bisa dari dinas juga saat kita posyandu harus ada yang turun biar tahu oh keadaan di posyandu Argapura saat ini seperti ini," ujarnya.

Christin juga menyoroti masalah asupan gizi yang perlu diperhatikan pada lansia. "Karena mereka sudah rentan jadi makanan harus diperhatikan karena kasihan mereka sudah datang terus kegiatan hanya itu saja periksa tensi, berat badan dan lainnya, terus tidak ada air minum juga yang mereka nikmati, habis itu mereka pulang," jelasnya.

Ia melihat kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya perhatian dari pemerintah dan keluarga, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi. "Selama ini baru ada perhatian hanya sebatas pemeriksaan kesehatan saja," akunya.

Christin berharap agar pemerintah dapat lebih serius dalam menangani masalah lansia, tidak hanya fokus pada pemeriksaan kesehatan, tetapi juga memberikan perhatian pada aspek-aspek lain seperti gizi dan kesejahteraan ekonomi keluarga.

"Harapan saya pemerintah harus kalau bisa turun langsung ke lapangan karena selama ini yang turun bersama kita itu pihak puskesmas. Kalau bisa dari dinas juga saat kita posyandu harus ada yang turun biar tahu oh keadaan di posyandu Argapura saat ini seperti ini," ucapnya.

Insentif yang Layak dan Pelatihan Bagi Para Kader

Salah satu kader posyandu lansia yang berdedikasi Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, yaitu bernama Margaretha Fonataba.

Margaretha mengungkapkan, bahwa keberadaan posyandu khusus lansia sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan para lansia yang semakin meningkat.

Alasannya, selama ini masih kurang fasilitas dan tempat yang memadai untuk melaksanakan kegiatan posyandu lansia di wilayah tugasnya.

"Kalau fasilitas di sini belum terlalu lengkap. Kita di sini pakai di posyandu balita, kita hanya numpang semua, karena di Kelurahan Argapura tidak ada. Kita kadang numpang di rumah RT. Jadi kita setuju harus punya posyandu khusus lansia," tutur Margaretha.

Lalu, Margaretha juga menyoroti masalah insentif bagi para kader posyandu yang dinilai masih kurang. Ia berharap agar insentif yang diberikan dapat ditingkatkan dan diberikan secara teratur.

"Kita harus siap keuangan itu yang paling penting. Jadi 1 tahun pembayaran 2 kali, 1 bulan itu Rp130 ribu kalau kita biasanya bantu tensi, bantu timbang berat badan, lingkar perut, pokoknya seputar itu," jelasnya.

"Untuk insentif para kader bagusnya kita kembalikan ke suster dan puskesmas untuk pembayaran. Kalau dari dinas kesehatan itu ada yang dapat dan ada yang tidak dapat. Kalau bisa pembayarannya langsung melalui kita punya rekening saja" sarannya.

Menurut Margaretha, pelatihan bagi para kader posyandu lansia juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ia berharap agar pelatihan dapat dilakukan secara rutin dan tidak hanya terfokus pada posyandu bayi balita.

"Memang harus ada karena kita selama ini belum ada pelatihan. Itu waktu pelatihan di posyandu balita yang kita ikuti kemarin kita juga sama-sama di posyandu balita. Kita satu posyandu, jadi kita keluar dari pelayanan bayi balita, kita masuk ke posyandu lansia," katanya.

Selain masalah fasilitas, insentif dan pelatihan bagi para kader, Margaretha juga menyoroti masalah kurangnya bantuan dan dukungan bagi para lansia.

Pemerintah pun diharapkan dapat memberikan bantuan berupa bahan makanan, minuman, atau susu yang dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi lansia.

"Kalau kita bisa usul mungkin harus ada bantuan untuk para lansia berupa bahan makanan, minuman, susu yang bisa dibantu untuk para lansia karena selama ini tidak ada. Yang ada hanya posyandu bayi balita, kalau mereka tidak datang kita yang kunjungan di rumah," ujarnya.

Margaretha tentunya ingin melihat adanya pelayanan yang lebih baik, tidak hanya fokus pada pemeriksaan kesehatan, tetapi juga pada kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup lansia, seperti olahraga dan kegiatan sosial.

"Kalau dalam 3 tahun ini kayaknya tidak ada perubahan apa-apa. Jadi hanya datang timbang terus periksa gula darah terus asam urat, kolesterol, sudah habis itu pulang. Jadi maksudnya untuk pelayanan setiap hari begitu. Jadi misalnya ada yang kurang enak badan hari ini bisa langsung datang atau apa rumah sehat begitu untuk para lansia. Jadi biar mereka olahraga kumpul-kumpul sesama biar ada teman cerita," pungkasnya.

"Di Posyandu Khusus Lansia juga mereka (lansia) bisa melakukan hal-hal bermanfaat, seperti bagi lansia sehat dan produktif mereka bisa dilatih membuat sesuatu sesuai bakat dan kemampuan mereka. Jadi selain pelayanan kesehatan mereka terpenuhi juga kebutuhan sosial dan ekonomi juga," timpalnya.



POSYANDU KHUSUS LANSIA- Ratih Nurani Sumardi, ahli gizi di Jayapura berbicara tentang pentingnya asupan gizi bagi lansia. Foto: Tribun-Papua.com/Lidya Salmah

Pemenuhan Gizi Lansia

Ratih Nurani Sumardi, ahli gizi di Jayapura ini, memberikan tanggapan terkait pentingnya pemenuhan gizi bagi lansia terkait keberadaan Posyandu Khusus Lansia di kota ini.

Ratih yang juga dosen gizi di Poltekkes Kemenkes Jayapura, menjelaskan, bahwa lansia mengalami penurunan fungsi organ, termasuk indra pengecap dan penciuman. Hal ini dapat memengaruhi asupan makan lansia.

Selain itu, enzim pencernaan lansia juga menurun fungsinya, sehingga mereka lebih sensitif terhadap makanan.

"Mungkin kalau lihat gizi dari sisi lansia itu kan sebenarnya terjadi penurunan pada lansia, penurunan fungsi, penurunan organ. Salah satunya yang menurun adalah indra pengecap, indra pencium, semua indra sehingga ini kadang-kadang mempengaruhi asupan makan pada lansia," tutur Ratih.

Lebih lanjut, Ratih menjelaskan, bahwa lansia di atas 60 tahun juga mengalami penyakit degeneratif, sehingga mereka tidak bisa makan sembarangan.

Pembatasan makanan yang berlebihan, baik karena kurang pengetahuan maupun karena anjuran dokter, dapat menyebabkan penurunan asupan gizi dan status gizi lansia.

"Salah satu yang sering kami lihat itu pembatasan makanan ini kadang-kadang membuat lansia ini takut untuk makan sehingga dia banyak sekali membatasi makanan mungkin karena kurang pengetahuan atau mungkin karena dia tahu strip dengan pembatasan makanan itu sehingga kadang-kadang terjadi penurunan asupan dan ini berdampak kepada status gizi," jelasnya.

Namun, ada juga lansia yang tidak terlalu ketat dalam membatasi makanan.

Mereka mungkin beranggapan bahwa umur sudah takdir Tuhan, sehingga mereka makan tidak terkontrol. Hal ini dapat berdampak pada penyakit seperti diabetes dan kolesterol.

"Ada yang menganggap bahwa 'ah ini kan umur sudah Tuhan yang kasih' begitu dengan keyakinan seperti itu dia kadang-kadang makannya tidak terkontrol. Makanya ini akan berdampak pada penyakitnya, dia bakal berdampak pada gula darahnya tidak terkontrol," ujar Ratih.

Ratih menekankan pentingnya pemenuhan zat gizi makro dan mikro bagi lansia. Zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan zat gizi mikro terdiri dari vitamin dan mineral. Namun, jumlah kebutuhan zat gizi lansia berbeda dengan kelompok usia lainnya.

"Memang ini harus terpenuhi tetapi pada lansia jumlahnya akan berbeda dengan pada saat balita, pada saat remaja dan lain sebagainya," katanya.

Ratih mencontohkan, lansia dengan diabetes disarankan untuk mengurangi konsumsi karbohidrat sederhana seperti gula dan jus buah.

Kebutuhan gizi lansia juga berbeda-beda tergantung pada status kesehatan, tinggi badan, berat badan, dan aktivitas fisik.

"Sehingga memang harus dihitung masing-masing dulu, harus dilihat dulu penyakitnya apa terus kemudian untuk tinggi badan dan berat badan pada lansia itu juga karakteristik kita itu mempengaruhi kebutuhan kita," jelasnya.

Soal ketersediaan bahan makanan, menurut Ratih, di Kota Jayapura tidak menjadi masalah. Pasar-pasar di Jayapura juga menyediakan berbagai sumber zat gizi yang dibutuhkan.

Hanya saja, pengetahuan lansia tentang gizi dan cara menyiapkan makanan yang sesuai kebutuhan masih perlu ditingkatkan.

"Kalau ketersediaan bahan makanan karena kita di Kota Jayapura itu tidak ya karena di pasar itu sumber-sumber zat gizi itu tersedia cuma masalahnya di sini mungkin pengetahuan dari lansia sehingga mereka tidak bisa menyiapkan makanan yang sesuai kebutuhan dan dengan harga yang terjangkau," katanya.

Ratih juga menyoroti pentingnya edukasi gizi bagi lansia dan keluarga.

Menurutnya, edukasi gizi dapat membantu lansia dan keluarga memahami pentingnya gizi seimbang dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

"Sebenarnya kalau zat gizi kita memiliki kelompok zat gizi yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi ada zat gizi makro, zat gizi mikro. Zat gizi makro itu karbohidrat, protein, lemak, sedangkan yang mikro itu ada vitamin dan mineral. Nah, memang ini harus terpenuhi tetapi pada lansia jumlahnya akan berbeda dengan pada saat balita, pada saat remaja dan lain sebagainya," ujarnya.

Ratih menyarankan agar edukasi gizi tidak hanya diberikan kepada lansia, tetapi juga kepada keluarga yang menyiapkan makanan untuk lansia. Hal ini penting karena keluarga memiliki peran besar dalam memastikan lansia mendapatkan makanan yang bergizi dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Kalau pengalaman saya ke posyandu lansia itu lansia yang datang ke posyandu memang lansia tanpa didampingi oleh keluarga. Beda halnya dengan balita kalau balita dia diantar oleh orang tuanya. Jadi saat kita edukasi itu orang tuanya bisa kita edukasi. Nah, di sini ini mungkin kalau misalnya ada edukasi untuk lansia mungkin sasarannya bukan lansianya tetapi keluarga yang menyiapkan makanan yang perlu mendapatkan edukasi tentang bagaimana sih penyediaan makanan bagi lansia," jelasnya.

Lebih jelas kata Ratih, bahwa posyandu khusus lansia memiliki peran penting dalam memberikan edukasi gizi dan memantau kesehatan lansia. Ia berharap agar posyandu tersebut dapat lebih dioptimalkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi lansia.

"Sebenarnya masing-masing puskesmas itu sudah ada ahli gizi dan ahli gizinya itu rata-rata sudah memiliki STR, mereka itu cukup mampu. Nah, di sini tinggal bagaimana ahli gizinya menjalankan tugasnya dalam mengatur makan," katanya.

Terakhir, Ratih menekankan, bahwa pemenuhan gizi lansia adalah tanggung jawab keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam memastikan lansia mendapatkan makanan yang bergizi dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Kayaknya perlu dikaji lebih dalam apa keuntungannya, apa kerugiannya. Nah, sekarang dampaknya banyak pengurangan anggaran ya. Jadi saya enggak tahu apa tapi itu perlu dikaji lagi perlu atau tidak seperti itu. Tapi yang jelas lansia ini perlu mendapatkan perhatian, siapa yang paling perhatian itu keluarga. Nah, sistem keluarga ini memang perlu ditingkatkan lagi bagaimana perhatian untuk satu keluarga ini memperhatikan asupan dari anggota keluarga, bukan cuma lansia saja sebetulnya," pungkasnya.



POSYANDU KHUSUS LANSIA- Ketua Komisi D DPRD Kota Jayapura, Deli Lusyana Watak berbicara soal dukungan dirinya sebagai wakil rakyat kepada Pemkot Jayapura untuk membangun posyandu lansia khusus. Foto: Tribun-Papua.com, Lidya Salmah

DPRD Dorong Pemkot Jayapura Bangun Posyandu Khusus Lansia

Ketua Komisi D DPRD Kota Jayapura, Deli Lusyana Watak mengungkapkan, keberadaan posyandu khusus lansia perlu ada di setiap distrik atau kelurahan di Kota Jayapura.

Menurut Deli, alasannya adalah mengingat populasi lansia yang terus meningkat, sementara akses terhadap layanan kesehatan masih terbatas. Sebab itu, Komisi D DPRD Kota Jayapura mendorong Pemkot setempat untuk dapat menempatkan posyandu khusus lansia di setiap distrik.

Lanjut Deli, langkah yang dilakukan Komisi D tentunya adalah berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemkot Jayapura untuk mendorong hadirnya posyandu khusus lansia.

"Jadi terkait tanggapan yang diminta oleh masyarakat supaya mendorong pemerintah untuk bisa membangun posyandu khusus lansia di setiap distrik itu kami sangat setuju, sangat bagus karena apa? Supaya para lansia ini lebih mudah mengakses layanan kesehatan,"katanya di Jayapura, Papua, Senin (10/2/2025).

Deli tak memungkiri, bahwa memperlakukan lansia dan kelompok usia lainnya itu membutuhkan kekhususan, sehingga pelayanan kesehatan bagi para lansia harus dipisahkan dengan posyandu umum.

"Kita semua tahu bahwa merawat lansia dan kelompok umum itu tidak sama. Maka itu, dengan adanya posyandu khusus lansia, mereka (lansia) akan mendapatkan treatment khusus," ujarnya.

Dia menambahkan lagi, bahwa posyandu khusus lansia akan memungkinkan para lansia mendapatkan pelayanan yang lebih terfokus dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Dengan adanya posyandu khusus lansia, diharapkan para lansia dapat merasa lebih nyaman dan diperhatikan," katanya.

Selain itu, Komisi D juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas kader posyandu, khususnya dalam menangani lansia.

"Kader posyandu perlu mendapatkan pelatihan khusus agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada lansia," ujarnya.

"Selain pelatihan juga dari kemarin juga saya sempat bicara ke dinas untuk kader juga agar lebih diperhatikan terkait mungkin ada BPJS Ketenagakerjaannya seperti itu, insentif juga saya sudah bicara ada di notulen kami tentang insentifnya,"timpalnya.

Terkait keterbatasan anggaran yang kemungkinan menjadi penghambat dalam pembangunan posyandu khusus lansia, menurut Deli, bisa merangkul pihak ketiga (swasta).

"Ya, kalau memang anggarannya tidak memadai. maka kita harus memakai cara seperti itu (swasta)," katanya,"tuturnya.

Meski demikian, Komisi D akan terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi kendala anggaran tersebut.

“Apalagi saat kami reses di daerah Dok 9 kali, masyarakat di sana juga meminta untuk dibuatkan posyandu lansia namun belum terealisasi,”bebernya.

Sebagai fungsi pengawasan, kata Deli, Komisi D akan terus memantau dan mengawasi realisasi program pembangunan posyandu khusus lansia demi meningkatkan kualitas hidup para lansia di Kota Jayapura.

“Kalau dari DPR sendiri kami kan memiliki tugas salah satunya itu monitoring. Jadi kalau misalkan dari pemerintah sudah oke, kita tetap pengawasan dan monitoring agar terealisasi dengan tepat sasaran seperti itu,” pungkasnya.



POSYANDU KHUSUS LANSIA- Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, dr. Ni Nyoman Sri Antari menjelaskan bahwa lansia memiliki peran penting dalam keluarga.

Foto: Tribun-Papua.com/Lidya Salmah.

Pemkot Terus Berupaya Meningkatkan Pelayanan kepada Lansia

Keberadaan posyandu khusus lansia di Kota Jayapura, Papua, tentu menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kota Jayapura. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, dr. Ni Nyoman Sri Antari menjelaskan, bahwa lansia memiliki peran penting dalam keluarga.

Jika lansia sehat dan berpengetahuan, mereka dapat memberikan arahan yang baik bagi keluarga. Selain itu, banyak lansia yang juga menjadi pengasuh bayi dan balita.

"Lansia itu kadang mengambil keputusan dalam keluarga masih dituakan gitu yaa. Jadi kalau dia sehat, pikirannya cerdas juga pengetahuan terus ditambah maka dia akan bisa mengarahkan keluarga itu jadi lebih baik dan juga banyak lansia yang menjadi pengasuh bayi balita. Kalau dia sakit siapa yang ngasuh begitu," ujar Nyoman.

Untuk meningkatkan kualitas hidup lansia, menurut Nyoman, Pemerintah Kota Jayapura memiliki program sekolah lansia.

Program ini memberikan pendidikan kesehatan bagi lansia agar mereka dapat menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga, serta tetap produktif.

"Sekarang kita punya sekolah lansia ditamatkan yaa. Sudah ada sekitar berapa begitu di daerah Waena. Jadi kita satu posyandu itu dilatih untuk sekolah lansia itu diberikan pendidikan oleh kesehatan dia untuk bagaimana menjaga cucu jadi dia produktif," jelasnya.

Nyoman juga menyampaikan, bahwa target warga usia lanjut di Kota Jayapura pada tahun 2025 adalah 11.934 orang.

Pihaknya akan terus memantau kondisi di lapangan dan berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi lansia.

"Target warga usia lanjut itu 11.934 orang di tahun 2025 ini yang jadi sasaran kita. Jadi memang kita harus lihat di lapangan juga nanti dengan adanya program layanan kesehatan gratis harusnya kita bisa lebih teliti lagi," katanya.

Terkait dengan keberadaan posyandu khusus lansia itu sendiri, Nyoman menjelaskan, bahwa saat ini terdapat 50 posyandu lansia di Kota Jayapura. Namun, ke depan, posyandu-posyandu ini akan diintegrasikan menjadi posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer).

"Ada 50 posyandu lansia sebenarnya tetapi sekarang kita akan merger menjadi posyandu ILP, posyandu interegasi pelayanan primer. Jadi kita gabung semua ada di situ sama kluster-kluster di situ sama seperti puskesmas. Jadi pelayanan di puskesmas juga begitu kluster 1 pendaftaran, kluster 2 bayi balita ibu hamil kemudian kluster 3 itu dewasa lanjut usia, kluster 4 atau lintas kluster itu ada lab ada gigi," terang Nyoman.

Tambahnya, "Jadi modelnya seperti itu sekarang. Jadi kalau kita ketemu kita layani dari ujung rambut sampai ujung kaki, enggak khusus lagi. Maksud saya ketika datang ke posyandu semua datang ke posyandu gitu. Jadi kalau di posyandu ibu hamil yaa di bagian kluster 2 begitu, kalau di lansia kluster 3".

Integrasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih komprehensif dan efisien bagi masyarakat. Nyoman berharap agar dengan adanya integrasi ini, pelayanan kesehatan bagi lansia dapat semakin meningkat.

"Sebenarnya tenaga pasti kemudian soal tempat juga. Jadi kalau saya berbicara lagi sekarang posyandu, posyandu lansia, posyandu balita, posbindu semuanya sekali lagi tahun ini masih kita akan merger, semua kita akan gabung, karena itu kebijakan nasional,"katanya.

"Dalam kebijakan nasional itu interegasi layanan primer beggitu, jadi semuanya kita padukan di dalam pelayanan yang intinya akan terpadu," sambungnya.

"Jadi saya rasa ini (posyandu integrasi) lebih bagus, lebih efisien kalau membayangkan hasilnya tapi ini baru berjalan tahun kemarin (2025) bulan November kita baru dan kita lihat perkembangan tahun ini seperti apa," paparnya lagi.

Nyoman juga menyampaikan, bahwa pihaknya akan terus mengevaluasi terhadap pelaksanaan program posyandu integrasi ini. Jika ditemukan kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian.

"Kita keputusannya surat keputusan Wali Kota Jayapura pada November 2024 itu dan kemudian kita perbaiki di tahun ini dari puskesmas turun ke pustu dari pustu turun ke posyandu. Jadi paling 1 puskesmas 1 posyandu dulu lah kita buat, ya paling tidak ada muncul walaupun tidak nanti ada masih kita evaluasi," beber Nyoman.

"Kita juga di kantor membagi tim itu tidak lagi kepala bidang ini atau itu, tapi kita membagi untuk kluster. Nah nanti gabungan 1 tim kerja itu dari bidang-bidang yang ada".

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan stakeholder terkait, sangat dibutuhkan untuk keberhasilan program posyandu integrasi ini.

Nyoman kembali berharap agar program ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesehatan dan kesejahteraan lansia di Kota Jayapura. (*)

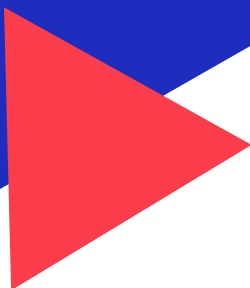
Artikel ini dimuat tanggal 22 Februari 2025

Tautan Artikel:

<https://s.id/PosyanduLansiaLebihdariSekadarTempatKumpul>



4



► 04. Buruh Pabrik dan Keterbatasan "Daycare" Layak

Caecilia Mediana, Kompas.id

Sudah dua bulan terakhir, Enny, salah satu buruh perempuan di sebuah pabrik garmen di Cimahi, Jawa Barat, harus bolak-balik ke Rumah Sakit dr Ali Sadikin mengantar anak keduanya yang berusia 6 tahun untuk pemeriksaan neurologi. Tak terhitung sudah berapa ongkos yang dia keluarkan. Hasil cek terakhir menunjukkan ada bagian dalam kepala anaknya yang dinyatakan tidak normal.

Dokter di Rumah Sakit dr Ali Sadikin, kata Enny, menyebut sel kanker di bagian kepala aktif. Bagian leher anaknya juga ada benjolan yang sampai sekarang masih diperiksa. Dia berulang kali mendatangi akupunktur untuk mendapatkan pengobatan alternatif bagi benjolan yang ada di leher anaknya itu.

Enny menceritakan, mulanya anak kedua mengalami demam disertai kejang. Di bagian leher ada benjolan yang kata anaknya suka perih. Dari situlah, dia mulai membawa anaknya ke rumah sakit sembari mencoba pengobatan alternatif, seperti akupunktur.

Dari sanalah, sejauh ini Enny disarankan mencoba mengubah pola makan dan asuh anak. Misalnya, tidak boleh diberikan makanan instan, olahan, gorengan cepat saji, dan mengurangi terpapar radiasi.

"Diduga tumor. Saya menduga penyebabnya apakah karena sejak bayi, saya titipkan dia ke tetangga (yang masih saudara) lalu, mulai usia 1 tahun, dia sudah makan makanan instan dan olahan saat dititipkan," ujar Enny saat dihubungi, Minggu (23/2/2025), dari Jakarta.

"Yang bisa saya lakukan adalah mengurangi kebiasaan makan makanan instan, olahan, dan cepat saji. Anak kedua saya suka sekali, mungkin karena sejak usia 1 tahun sudah diberikan. Saya tidak mau berikan ponsel lagi untuk mengurangi (dampak) radiasi walaupun ini susah karena sejak kecil dan namanya dititipkan itu yang penting anak dititipkan tidak rewel dulu (sehingga mungkin kerap diberikan ponsel)," kata Enny.

Sebagai buruh pabrik garmen yang dibayar dengan gaji setara upah minimum, kondisi buruh perempuan, diakui Enny, terbilang sulit. Meskipun telah bekerja dalam waktu lama, upah yang diterima masih setara dengan upah minimum.

Enny yang sudah bekerja di sektor yang sama sejak 1997 pun mengalami hal itu. Dia mengungkapkan, praktik buruh perempuan menitipkan anak sejak bayi ke tetangga warga lokal, tetangga yang masih saudara, atau bahkan dipulangkan ke kampung halaman adalah praktik yang terus berulang.

"Jangan bayangkan tempat tinggal tetangga itu luas dan besar. Tempat tinggal mereka umumnya sama seperti tempat tinggal buruh pabrik, yaitu rumah petak yang menyerupai kamar kos dengan ventilasi minim," tuturnya.



Suasana tempat tinggal buruh perempuan yang bekerja di industri garmen dan tekstil di Cimahi, Jawa Barat. Foto diambil 16 Februari 2025.

Enny menceritakan, anak pertamanya yang lahir tahun 2003 sempat dititipkan ke rumah mertua di Lampung, daerah asal Enny dan suami, dari usia 40 hari hingga 5 tahun. Baru setelah itu dibawa ke Cimahi. Di Cimahi, anak pertamanya itu juga sempat dititipkan saat ia dan suaminya sama-sama bekerja.

"Waktu anak pertama berusia 40 hari, saya memutuskan kembali bekerja di pabrik. Anak saya tinggal dan diasuh mertua di Lampung," ucapnya.

Menurut dia, tidak ada cara lain untuk bertahan hidup, selain bekerja keras di pabrik bagi buruh pabrik yang rata-rata kelas menengah bawah dan berpendidikan rendah seperti dirinya. Target kerja yang kadang tidak masuk akal, letak ruang laktasi yang jauh dari ruang kerja, dan ketiadaan tempat penitipan anak adalah kondisi yang harus ia terima.



*Buruh perempuan di salah satu pabrik garmen di Jakarta Utara saat pulang kerja.
Foto diambil 16 Februari 2025. (Foto: Kompas/Mediana)*

Situasi serupa dialami Engkon (52), operator jahit di salah satu pabrik tekstil di Cimahi. Anak semata wayangnya yang berusia 8 tahun baru ketahuan menderita kanker.

Sama seperti Enny, Engkon juga menitipkan anaknya sejak usia bayi kepada keluarganya yang tinggal di Ciparay, sekitar 33 kilometer dari Cimahi. Dia hanya bisa mengunjungi anaknya setiap akhir pekan.

"Sejak usia 6 bulan, paru-paru anak sudah pernah dicek dokter dan hasilnya menunjukkan ada plek. Tidak jelas apakah sering terpapar asap rokok atau yang lain," ucap Engkon.

Kepada Kompas, ia menahan tangis saat menceritakan situasi yang tengah dihadapi. Engkon mengaku sekarang hanya dirinya yang bekerja, sedangkan suaminya sudah tidak lagi bekerja.

Apalagi, kini pabrik tempatnya bekerja tidak lagi menerapkan upah lembur lantaran permintaan yang tengah lesu. Terkadang, bahkan ia bekerja hanya selama tiga hari dalam sepekan, dan sisanya libur akibat produksi menurun. Dengan situasi seperti itu, sangat sulit membiayai pengobatan anaknya. Apalagi, upah yang ia terima hanya berkisar Rp 3 juta per bulan.

"Dokter menyarankan agar segera angkat, tetapi saya bertahan supaya anak diberikan obat dulu," katanya.

Cerita senada disampaikan Nita, buruh perempuan di salah satu pabrik tekstil di Bandung. Nita adalah orangtua tunggal bagi satu anak yang sekarang berusia 6 tahun. Sama seperti cerita Enny dan Engkon, Nita juga menitipkan anaknya sejak bayi ke tetangga yang paling dia percaya. Sebulan, dia membayar Rp 800.000 ke tetangga itu.

"Situasi paling susah adalah badan anak saya ringkih sehingga sering sakit. Saya mau tidak mau harus urus anak berobat sendiri, sering izin ke mandor, tetapi malah potong gaji dan tidak boleh ikut lembur," ucap Nita.

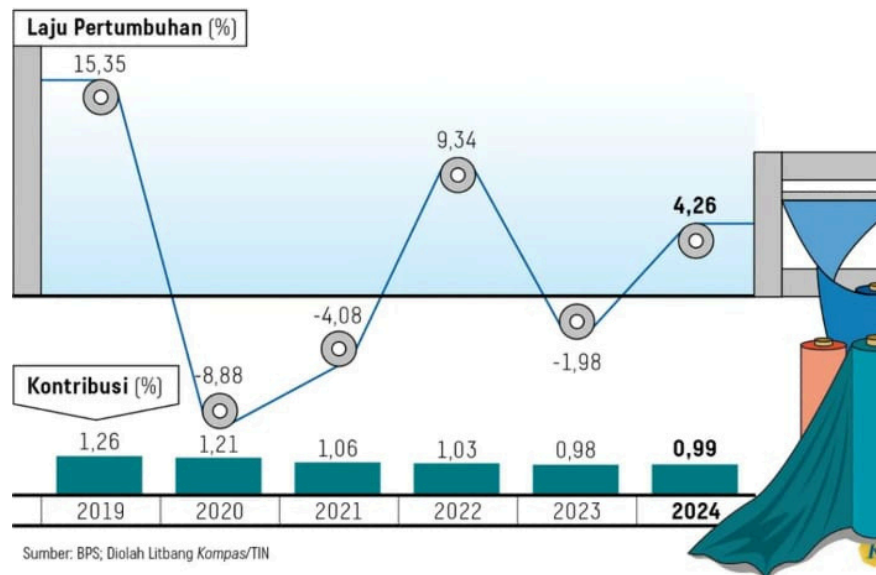
Nita mengatakan, dokter hanya menyarankan agar Nita rajin menjaga pola makan dan kebersihan si anak agar tidak mudah sakit.

"Saya tidak bisa menuduh tetangga. Di sekolah PAUD juga tidak menyediakan fasilitas penitipan anak. Sementara sebagai orangtua tunggal, saya harus bekerja sendiri dan baru bisa mengasuh sore hari sepulang bekerja," kata Nita.

Baik Enny, Engkon, maupun Nita mengatakan, menitipkan anak ke tetangga, saudara, atau orangtua di kampung adalah pilihan terbaik di tengah ketiadaan fasilitas penitipan anak yang dekat dengan tempat kerja. Walaupun mereka akui anak mereka kerap tidak mendapat pengasuhan yang berbasis hak anak.

Ketua Institut Solidaritas Buruh Surabaya Domin Dhamayanti berpendapat, praktik tersebut jamak ditemui di kalangan buruh padat karya. Praktik ini bahkan telah menjadi fenomena yang ada sejak puluhan tahun lalu yang terus terjadi sampai saat ini. Di kawasan industri yang lebih maju, seperti di Jakarta, buruh padat karya perempuan menitipkan anak ke tetangga yang masih kerabat dekat.

Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Tekstil pada PDB Nasional Cenderung Menurun



Infografik Riset Tekstil-Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Tekstil pada PDB Nasional Cenderung Menurun

Cerita senada disampaikan Nita, buruh perempuan di salah satu pabrik tekstil di Bandung. Nita adalah orangtua tunggal bagi satu anak yang sekarang berusia 6 tahun. Sama seperti cerita Enny dan Engkon, Nita juga menitipkan anaknya sejak bayi ke tetangga yang paling dia percaya. Sebulan, dia membayar Rp 800.000 ke tetangga itu.

"Situasi paling susah adalah badan anak saya ringkih sehingga sering sakit. Saya mau tidak mau harus urus anak berobat sendiri, sering izin ke mandor, tetapi malah potong gaji dan tidak boleh ikut lembur," ucap Nita.

Nita mengatakan, dokter hanya menyarankan agar Nita rajin menjaga pola makan dan kebersihan si anak agar tidak mudah sakit.

"Saya tidak bisa menuduh tetangga. Di sekolah PAUD juga tidak menyediakan fasilitas penitipan anak. Sementara sebagai orangtua tunggal, saya harus bekerja sendiri dan baru bisa mengasuh sore hari sepulang bekerja," kata Nita.

Baik Enny, Engkon, maupun Nita mengatakan, menitipkan anak ke tetangga, saudara, atau orangtua di kampung adalah pilihan terbaik di tengah ketiadaan fasilitas penitipan anak yang dekat dengan tempat kerja. Walaupun mereka akui anak mereka kerap tidak mendapat pengasuhan yang berbasis hak anak.

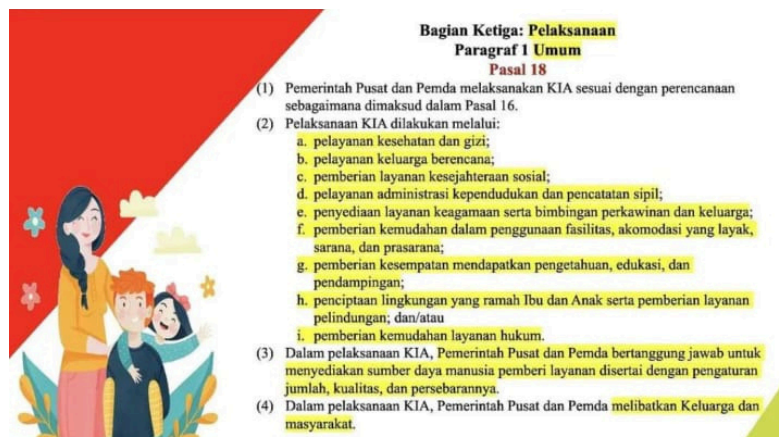
Ketua Institut Solidaritas Buruh Surabaya Domin Dhamayanti berpendapat, praktik tersebut jamak ditemui di kalangan buruh padat karya. Praktik ini bahkan telah menjadi fenomena yang ada sejak puluhan tahun lalu yang terus terjadi sampai saat ini. Di kawasan industri yang lebih maju, seperti di Jakarta, buruh padat karya perempuan menitipkan anak ke tetangga yang masih kerabat dekat.

Selain keterbatasan akses fasilitas, secara khusus masih berkembang stigma menitipkan anak ke orang lain, terutama bukan kerabat dekat itu dianggap tabu karena menggantikan peran keluarga. Ditambah lagi, masih banyak pemberitaan mengenai tempat penitipan anak (TPA) abal-abal yang mengakibatkan hak anak tidak terpenuhi.

“Pengetahuan pengasuhan berbasis hak anak belum 100 persen dipahami oleh warga Indonesia, termasuk pejabat-pejabat pemerintah walaupun sudah ada Peta Jalan Ekonomi Perawatan. Langkah yang diperlukan sekarang adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengasuhan berbasis hak anak, seiring dengan penyediaan TPA berkualitas dan terjangkau,” ujar Domin.

Pada 2024, Pemerintah Indonesia merilis Peta Jalan Ekonomi Perawatan dan menetapkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (UU KIA).

Pada Pasal 18 Ayat (2) huruf (f) UU KIA, pelaksanaan kesejahteraan ibu dan anak dilakukan melalui pemberian kemudahan berbagai akomodasi yang layak di tempat kerja. Kemudian, Pasal 30 Ayat (3) disebutkan bahwa dukungan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana di tempat kerja berupa fasilitas layanan kesehatan, penyediaan ruang laktasi, dan tempat penitipan anak.



Pelaksanaan UU KIA pada fase 1.000 HPK

Pasal 30 Ayat (4) UU KIA mengamanatkan, pengusaha wajib menyediakan daycare di tempat kerja. Ketentuan ini berlaku untuk perusahaan swasta ataupun milik negara.

Hal itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja. Sarana kerja yang dimaksud adalah ruang air susu ibu, ruang penitipan anak, dan fasilitas layanan kesehatan.

Selanjutnya, ada Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak/Daycare Ramah Anak bagi Pekerja di Daerah. Ini merupakan imbauan kepada seluruh kepala daerah melalui dinas yang mengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk melaksanakan penyelenggaraan, koordinasi pemantauan, dan pengawasan terhadap layanan taman pengasuhan anak.



Lasmi, salah satu buruh perempuan di sebuah pabrik garmen di Jakarta Utara, memeluk anaknya seusai dijemput di rumah anggota keluarga.

Foto diambil 16 Februari 2025. (Foto: Kompas/Mediana)

Apa yang dialami Enny, Engkon, dan Nita, menurut National Project Officer of HIV/AIDS and Care Economy International Labour Organization (ILO) untuk kantor Indonesia dan Timor Leste, Early Dewi Nuriana, adalah contoh nyata betapa negara abai mengawasi pentingnya pengasuhan berbasis hak anak dengan tanggung jawab dan produktivitas pekerja perempuan.

"Masih banyak pengusaha yang belum memahami keberadaan fasilitas childcare itu sangat berkontribusi tingkat partisipasi dan produktivitas kerja perempuan, walaupun mayoritas karyawan mereka perempuan. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh sikap kebijakan pemerintah," katanya.

Menurut Early, di Indonesia, beberapa perusahaan besar telah menyediakan fasilitas TPA. Hanya saja, realitanya, perusahaan yang melakukan itu biasanya berlatar belakang multinasional atau memiliki inti bisnis berupa produksi barang sehari-hari dan perawatan anak.

Anak Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti, saat dikonfirmasi, menjelaskan, keberadaan tempat penitipan anak (TPA) secara kuantitatif masih belum memadai dan cenderung terpusat di pulau Jawa. Tidak hanya belum memadai secara kuantitatif, TPA yang tersedia saat ini pun juga cenderung belum memiliki standar kualitas yang memadai.

Untuk mengatasi hal tersebut, Eko menyampaikan, kementerian merekomendasikan penyediaan TPA atau daycare dibentuk berdasarkan basis industri, komunitas, dan noninstitutional based/ individu dan harus sesuai dengan standar Taman Asuh Ramah Anak.

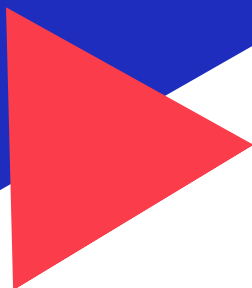
Artikel ini dimuat tanggal 24 Februari 2025

Tautan Artikel:

<https://s.id/BuruhPabrikdanKeterbatasanDaycareLayak>



5



► 05. Perjuangan Buruh Pengupas Bawang, Kerja Sambil Momong Anak

Aan Ariska Febriansyah, rri.co.id

KBRN, Makassar - Sudah 10 tahun ini, Faizah (38) bekerja sebagai buruh pengupas bawang di sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di Lantebung, wilayah pesisir barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sembari bekerja, perempuan yang akrab disapa Icha ini juga mesti momong anaknya yang masih berusia setahun.

Icha tak merasa terganggu, saat si bocah bersandar manja di punggung. Bahkan, “Kalau lagi rewel, saya berhenti untuk kupas bawang,” katanya saat ditemui, Sabtu (1/2/2025). Sebab, baginya, menjaga sendiri anaknya jauh lebih baik ketimbang menitipkan kepada tetangga atau ke Tempat Penitipan Anak (TPA) atau daycare. Selain khawatir untuk menitipkan anak kepada orang lain, ia juga tak punya akses untuk menjangkau TPA.

Merawat anak sambil bekerja merupakan tradisi yang tidak dianjurkan. Sebab, di tempat kerja, bisa jadi terdapat peralatan atau bahan yang membahayakan anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) mengamanatkan adanya TPA untuk melindungi anak dan perempuan yang bekerja.



Faizah (38) bekerja sebagai buruh pengupas bawang di sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di Lantebung, wilayah pesisir barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ia bekerja sembari momong anaknya yang masih berusia setahun. (rri.co.id/Aan Ariska)

Pemerintah juga mengaturnya melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja. Sarana kerja yang dimaksud, seperti ruang laktasi, fasilitas layanan kesehatan, dan TPA atau daycare.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dan International Labour Organization (ILO) telah meluncurkan dokumen peta jalan atau roadmap Ekonomi Perawatan 2025-2045, sebagai komitmen memajukan peran perempuan dan melindungi hak-hak anak di ranah ekonomi.

Masalahnya, tradisi perempuan bekerja sambil momong anak sudah sangat jamak. Selain Icha, ada Nuraeni (38), juga buruh pengupas bawang. Ia mengatakan pekerjaannya tidak memiliki jam kerja khusus. Bahkan, ia bekerja sepanjang hari, tidak ada waktu libur, dan tidak mendapatkan perlindungan sebagai pekerja.

Sebelum menjadi buruh pengupas bawang merah, Nuraeni sempat bekerja di sebuah perusahaan multi nasional yang pabriknya ada di Makassar, pada awal pernikahannya. Namun, ia memilih berhenti untuk mengurus keluarga.

Tidak hanya momong anak sendiri, Nuraeni juga membantu menjaga anak saudaranya yang ditinggal bekerja di tempat jauh. Saat ditemui di kediamannya, Nuraeni masih sibuk mengupas bawang. Di dekatnya, ada ayunan –terbuat dari kain-- untuk menidurkan bocah. “Jadi kalau (anak) mau tidur masuk ke dalam ayunan. Sambil di ayun juga sambil tetap kupas bawang merah,” tambahnya.

Ibu tiga anak itu lebih memilih merawat sendiri anak-anaknya, ketimbang menitipkan di tempat penitipan anak (day care). Bukan tanpa sebab, Nuraeni mengatakan, setelah melihat beberapa berita mengenai penitipan anak, dirinya menjadi takut.

Padahal, pasal 4 ayat 3 huruf e UU KIA mengatur bahwa setiap ibu yang bekerja berhak mendapatkan akses penitipan anak yang terjangkau secara jarak dan biaya. Bahkan, untuk mereka yang bekerja pada sektor non formal seperti pengupas bawang, juga seharusnya mendapatkan manfaat dari aturan ini.



Nuraeni (38) Ibu tiga anak itu lebih memilih merawat sendiri anak-anaknya, ketimbang menitipkan di tempat penitipan anak (day care). (rri.co.id/Aan Ariska)

Koordinator Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK Ornop) Samsang Syamsir menyambut baik daycare, sebagai upaya mendekatkan anak dengan orang tua, terutama ibu yang bekerja. Di mana, dalam waktu dan jarak yang dekat dapat memantau langsung anaknya.

Fase 1000 HPH, menurut Samsang, merupakan fase krusial tumbuh kembang anak yang membutuhkan perhatian khusus. Namun amanah UU KIA No. 4/2024 ini adalah daycare harus disertai pengawasan ketat.

“Yang paling penting, memastikan bahwa tempat kerja sudah mengadakan sarana prasarana daycare tersebut dan telah berjalan fungsinya.” Jadi, tidak sekedar memenuhi perintah UU saja.

Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) juga memandatkan akses daycare yang mudah dan murah (terjangkau). Sehingga, keberadaannya bisa menjadi hal positif, apalagi bisa memberi ruang bagi ibu untuk kembali ke pekerjaan setelah memiliki buah hati. Studi menunjukkan dengan adanya pelayanan daycare di tempat kerja membuat kaum ibu bisa lebih produktif dalam bekerja.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Selatan, Andi Mirna, mengatakan sejauh ini belum ada sosialisasi UU KIA ke daerah.

Tapi, kata Mirna, penyediaan daycare sudah diwajibkan di perkantoran. “Daycare wajib ada di setiap kantor pelayanan publik,” katanya, Selasa 4 Februari 2025.

Bahkan, kata Mirna, surat edaran yang mewajibkan penyediaan daycare sudah ada jauh sebelum UU KIA disahkan. “Sudah pernah dibuat edaran di zaman Andi Sudirman Sulaiman jadi gubernur (periode pertama),” jelasnya.

Upah Minim, Kerja Tanpa Kepastian



Seorang buruh pengupas bawang di sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di Lantebung, wilayah pesisir barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam sehari, buruh pengupas masing-masing mendapatkan jatah 25 kilogram (kg) bawang merah untuk dikupas. (rri.co.id/Aan Ariska)

Dalam sehari, baik Icha maupun Nuraeni masing-masing mendapatkan jatah 25 kilogram (kg) bawang merah untuk dikupas. Setelah dikupas, bobotnya tinggal 20-23 kg. Upah mengupas bawang dihargai Rp 1.000 per kg. Itu berarti, pengupas bawang di daerah ini hanya mendapatkan uang Rp 20 ribu hingga Rp 23 ribu per hari. Atau sekitar Rp 600 ribu hingga Rp 690 per bulan. Itu pun jika bekerja sebulan penuh, tanpa absen sakit misalnya.

Berdasarkan Riset International Labour Organization (ILO), Faizah dan Nuraeni termasuk dalam 67,3 persen dari 2.217 responden yang mengatakan mereka merasa memiliki jam kerja yang lebih panjang dalam melakukan pekerjaan perawatan dibandingkan laki-laki.

Survei dilakukan pada 67,5 persen responden adalah perempuan dan 67,4 persen bekerja di perekonomian informal di 34 provinsi. Hasilnya menunjukkan jumlah persentase responden perempuan yang hampir sama (66,2 persen) mempunyai gagasan serupa bahwa mereka harus memprioritaskan kewajiban perawatan dibandingkan karier.

Berdasarkan data BPS pada 2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya 54%, sedangkan TPAK laki-laki 84%. Dengan kata lain, kesempatan perempuan untuk bekerja 30% lebih rendah dari laki-laki. Kesenjangan ini menjadi tantangan dalam meningkatkan angka TPAK perempuan yang ditargetkan mencapai 55% pada 2024.

Masalahnya, pekerja atau buruh seperti Faizah dan Nuraeni tidak menerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Sementara untuk BPJS Kesehatan memanfaatkan bantuan dari pemerintah berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Kalau dibilang pernah dapat musibah saat mengupas bawang, ya tentu saja pernah tapi diobati sendiri,” kata Nuraeni. Baginya teriris pisau adalah salah satu musibah yang bisa mengenai tangan pengupas bawang.



Proses pengolahan bawang goreng, dimana bahan mentahnya dikupas oleh masyarakat yang bermukim disekitar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di Lantebung, wilayah pesisir barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. (rri.co.id/Aan Ariska)

Menurut Sosiolog Anshar Aminullah, perempuan dan perawatan ekonomi secara tak langsung membentuk stigma dan sebuah konstruksi gender. Sebagai dampaknya, aktivitas kerja perawatan yang dianggap sebagai tugas perempuan tak mendapat pengakuan sebagai sebuah pekerjaan yang layak.

“Ekonomi perawatan erat kaitannya dengan upaya mencapai kesejahteraan sosial, keadilan serta kesetaraan gender dan pembangunan ekonomi di suatu wilayah,” ujarnya.

Penyediaan daycare merupakan salah satu solusi agar anak mendapatkan lingkungan yang aman dan sehat untuk tumbuh kembangnya. Maka, daycare menjadi alternatif bagi upaya menjaga perkembangan anak di 1000 hari pertama.

“Sehingga penting untuk mendukung tumbuh kembang anak di 1000 hari pertama yang secara langsung,” ujarnya. Selain itu, juga menciptakan kondisi psikis yang nyaman bagi ibu untuk bekerja di kantor masing-masing.

Tenaga Ahli Kemen PPPA, Rohika Kurniadi Sari mengatakan tempat penitipan anak berkualitas menjadi faktor pendukung dalam optimalisasi produktivitas kerja para perempuan pekerja yang sudah mempunyai anak untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan saat mereka bekerja.

“Layanan daycare memberikan solusi bagi orang tua yang bekerja agar mereka dapat fokus pada pekerjaannya tanpa khawatir tentang perawatan anak-anak mereka,” kata Rohika dilansir dari laman resmi kemenpppa.go.id, Senin (24/2/2025).(*)

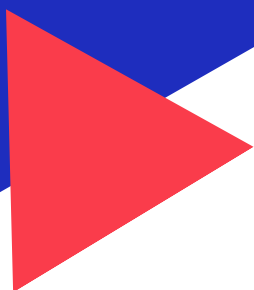
Artikel ini dimuat tanggal 25 Februari 2025

Tautan Artikel:

<https://s.id/PerjuanganBuruhPengupasBawangKerja>



6



► 06. Potret Buram Perawat Lansia di Jabodetabek

Petrus Fidelis Ngo, Parboaboa.com



Seorang perawat lansia sedang mendorong kursi roda bersama pasiennya di daerah Kedoya, Jakarta Barat (Foto: PARBOABOA/Defri)

PARBOABOA, Jakarta - Keputusan Betty (28) keluar dari tanah “Nuca Lale”, sebutan khas untuk daerah Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), semula tak pernah terlintas dalam pikiran. Sejak ditinggalkan suaminya pada 2022 lalu, wanita berstatus single mother itu tak bisa berbuat banyak.

Di kampung, ia hanya menggarap kebun milik keluarga yang ditanami kopi. Hasilnya, tak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Saat itulah Betty bertemu tetangga kampung yang baru pulang merantau.

“Dia ajak saya ke Jakarta. Katanya ada pekerjaan di sana,” ungkapnya mengisahkan awal perjalanan sebagai perawat lansia, Senin (03/02/2024). Ia berpikir, makin lama di kampung akan semakin susah.

Akhirnya, Betty membuka lembaran hidup baru di Kota Metropolitan. Berbekal sekoper pakaian dan niat menopang kehidupan keluarga, ia tiba di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Saya dijemput seorang sahabat di pelabuhan." Betty sempat menginap beberapa malam di rumah kos sang sahabat. Hari keempat, ia minta diantar ke tempat yang akan mempekerjakannya.

Tempat yang dimaksud adalah sebuah yayasan home care yang menyediakan jasa perawatan lansia dan baby sitter. Lokasinya di Jakarta Barat.

Istilah home care semula merupakan model pelayanan kesehatan yang dirancang sesuai kebutuhan pasien, individu, dan keluarga. Pendiriannya merujuk Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Praktik Keperawatan.

Tujuannya meningkatkan, memelihara, dan memulihkan kesehatan, atau meningkatkan kemandirian, meminimalkan akibat dari ketidakmampuan dan penyakit terminal.

Belakangan, layanan home care berkembang pesat sebagai bagian dari ekonomi perawatan (care economy).

Ekonomi perawatan sendiri merupakan salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam forum G20 di Bali, 2020 lalu. Di bawah Presidensi Indonesia, ekonomi perawatan menjadi prioritas utama dalam pengembangan ekonomi sosial dan pembangunan nasional.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) telah meluncurkan dokumen peta jalan (roadmap) Ekonomi Perawatan 2025-2045, sebagai komitmen memajukan peran perempuan dan melindungi hak-hak anak di ranah ekonomi.

"Melalui peta jalan ini, kami berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, memberdayakan, dan melindungi perempuan dan anak-anak, sehingga mereka dapat meraih potensi yang penuh dalam ekonomi yang berkembang pesat," ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, saat peluncuran.

Masalahnya, pekerja perawatan di Indonesia seringkali tak mendapatkan hak-haknya, terutama perlindungan.

Betty misalnya, yang akhirnya diterima sebagai perawat lansia. Ia bertugas menjaga seorang kakek yang tinggal bersama anaknya di sebuah kompleks perumahan di Jakarta Barat.

"Awalnya baik-baik saja. Saya mengerjakan semua tugas seperti menyuapi pasien makan dan mengganti pakaiannya. Pokoknya saya siap 24 jam kalau ada kerjaan yang harus saya lakukan.

Namun, sebulan berselang, ibu satu anak ini mulai merasakan sederet kejanggalan. Pasien yang berusia sekira 68 tahun itu kerap menyuruhnya mengenakan pakaian seksi. Terkadang si kakek ingin dipijit, bahkan meminta ditemani tidur di ranjang. "Kok jadi begini?"

Suatu sore, se usai mandi, Betty kaget karena si kakek ada di depan kamar mandi. Secara tiba-tiba, ia memegang tangan Betty.

"Dia bilang, badanmu bagus, saya suka sekali." Betty berusaha menepis sembari berkata, "Opa jangan begitu. Tidak baik."

Merasa tak tahan, Betty mencoba berbagi cerita kepada seorang asisten rumah tangga di rumah itu. Namun, tak ada solusi. Si Mbak hanya menyarankan Betty bersabar.

Akhirnya, Betty menghubungi teman sekampung dan menceritakan situasi yang dialami. Bersimpati, tapi sang kawan tidak bisa beri jalan keluar. Dia mengembalikan keputusan kepada Betty, antara mau lanjut bekerja atau keluar.

Dengan segala keberanian, ia lantas mengajukan pengunduran diri kepada majikan. Ia menghubungi nomor kontak yayasan, tetapi mereka memintanya untuk bersabar sambil menunggu pengganti.

Betty mencoba jalan lain. Ia menghubungi yayasan home care yang membawanya bekerja sebagai perawat lansia di tempat tersebut.

Ia berharap yayasan akan bertindak tegas. Namun ternyata, setali tiga uang, yayasan hanya memintanya bersabar. "Mau bersabar sampai kapan? Ini sudah kejadian kesekian kali," ujar Betty kesal.

Persoalan Home Care

Bukan hanya Betty yang kecewa dengan sikap yayasan home care, yang tak peduli dengan hak-hak pekerja.

Kristina (29), juga perawat lansia asal NTT, mengalami nasib serupa. Ia mengaku kecewa dengan sebuah yayasan home care berinisial KR di Bekasi, yang lepas tangan saat ada persoalan.

Saat itu, Kristina yang bekerja sebagai perawat seorang Oma di Pondok Gede, Bekasi, dituduh mencuri barang.

"Saya melapor ke yayasan, tapi mereka bersikap pasif," ungkapnya kepada PARBOABOA, Senin (27/01/2025).

Persoalan lain, lanjut Kristina, yayasan tidak adil dalam memperlakukan perawat. Misalnya, soal pemotongan iuran bulanan.

Sebelum bekerja di Bekasi, dirinya pernah bergabung dengan yayasan home care di Koja, Tanjung Priok. Di sana, gajinya selalu dipotong setiap bulan. Sehingga, "terkesan saya juga bekerja untuk mereka."

Besaran iuran bervariasi. Biasanya, Kristina dipotong Rp 600 ribu per bulan. Artinya, dengan gaji Rp 3,5 juta, ia hanya menerima total Rp 2,9 juta dalam sebulan.

Padahal, katanya, bekerja merawat lansia itu tidak gampang, nyaris 24 jam non stop. "Kalau dipotong yayasan terus, saya rugi. Saya yang kerja tapi mereka yang dapat uang," katanya dengan nada kecewa.

Bahkan, ada yayasan yang menerapkan aturan, jika perawat tidak menyelesaikan tugas sedikitnya selama enam bulan, maka harus membayar ganti rugi sebesar Rp 2 juta.

Ada pula keluhan dari para pekerja yang uangnya dipegang yayasan. Mereka kesulitan meminta uang sisa. Bahkan terkesan, "seperti mengemis kembali."

PARBOABOA meminta konfirmasi ke beberapa yayasan home care di Jakarta Barat mengenai ketentuan kerja. Hasilnya, keluhan Kristina terbukti.

Sebuah LPK berinisial CM yang berlokasi di Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, misalnya mewajibkan pekerja membayar iuran bulanan ke yayasan.

"Kalau suster pertama kali ikut kami, ada pemotongan gaji," ujar Dewi, admin CM kepada PARBOABOA, Selasa (04/02/2025). Sesuai ketentuan tertulis, sebagian upah pekerja ditransfer ke yayasan.



*Tampak depan LPK berinisial CM yang berlokasi di Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat
(Foto: PARBOABOA/Defri)*

Dewi mencontohkan, jika perawat menerima gaji Rp 3 juta, maka ia mesti menyetor ke yayasan Rp 2,5 juta. Pembayaran bisa dicicil selama dua bulan kerja.

"Itu berlaku bulan pertama dan kedua, bagi anggota baru," jelas Dewi.

Pemotongan gaji untuk iuran tersebut tak sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan menyebutkan, pelaksana penempatan tenaga kerja berupa instansi pemerintah dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.

"Selain pemotongan gaji, CM juga mengatur masalah kesehatan perawat yang menjadi tanggung jawab penuh majikan.

Beragam aturan itu menjadi beban tersendiri bagi para perawat lansia. Beban kerja yang berat, ditambah tarikan iuran, membuat mimpi memperbaiki perekonomian keluarga seperti tak bisa tercapai.

Karena itu, kini, Betty dan Kristina memilih mencari sendiri majikan yang membutuhkan tenaga perawat lansia. Keduanya tak lagi mengandalkan jasa yayasan. Bagi keduanya, mencari sendiri "lebih menguntungkan daripada menggunakan perantara yayasan."

Sebab, kata Kristina, kalau lewat yayasan harus mengikuti kontrak. Bila kontrak tidak dipenuhi, pekerja harus membayar ganti rugi. Berbeda, "kalau mencari sendiri, tidak ada ikatan kontrak."

Regulasi yang Lemah

Ketua Asosiasi Senior Living Indonesia (ASLI), Trisno Muldani, tak menampik ada serderet persoalan yang kerap dialami para perawat lansia, mulai dari kekerasan hingga pelecehan.

Soal pelecehan, Trisno bilang, publik perlu melihatnya dari dua sisi, yakni sisi pemberi kerja (caregiver) dan sisi konsumen (customer). Keduanya perlu mendapat edukasi yang berkesinambungan.

"Kalau perawat pernah ikut pelatihan dan on job training, dia tentu tahu hak-haknya. Karena selama pelatihan, ada unit kompetensinya, termasuk proses penanganan kekerasan," ujarnya pada Sabtu (11/01/2025).



Trisno Muldani, Ketua ASLI saat memberikan materi pelatihan tentang Ekonomi Perawatan dari Perspektif Media (Foto: PARBOABOA/Defri)

Menurut Trisno, perawat lansia rentan terkena musibah karena lansia yang dirawatnya mengalami penurunan kesadaran. Imbasnya, mereka berisiko mendapat kekerasan, seperti dipukul dan dilecehkan.

"Kalau si caregiver-nya terlatih, dia tahu kontingensinya seperti apa. Beda dengan caregiver yang tidak terlatih," tambahnya.

Trisno mendorong masyarakat, terutama perempuan yang hendak bekerja sebagai perawat lansia untuk memilih yayasan tersertifikasi dan berbadan hukum resmi.

Ia memastikan ASLI memiliki regulasi yang jelas tentang hak dan kewajiban perawat. ASLI juga punya tim advokasi untuk mendampingi para perawat yang mengalami persoalan.

Masyarakat, katanya, perlu mendapat edukasi untuk mengetahui hal-hal tersebut. Setidaknya, sebelum bekerja, mereka harus mendapat pelatihan mumpuni yang menunjang pekerjaannya nanti.

Kepala Seksi Pelatihan, Penempatan, Produktivitas dan Transmigrasi (P3T) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jakarta Barat, Septian Tharir, mengatakan akan terus bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membina yayasan home care.



*Kepala Seksi P3T, Septian Tharir saat ditemui di Kantor Disnaker Jakarta Barat
(Foto: PARBOABOA/Defri)*

Sejauh ini, ada dua bentuk badan yang dikenal, yakni yayasan dan Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Tangga (LPPRT). Masalahnya, kata dia, wewenang Disnaker terbatas dalam mengurus masalah tenaga kerja.

"Hal itu membuat kami sulit bertindak lebih. Disnaker memang bertugas mengawasi, tapi itu terbatas pada korporasi atau lembaga berbadan hukum saja," katanya saat ditemui PARBOABOA, Rabu (12/02/2024).

Kewenangan Disnaker hanya membina yayasan yang punya izin resmi. Sedangkan penindakan terhadap yayasan yang belum berizin berurusan dengan Kemnaker.

Sejauh ini, Kemnaker disebut telah melakukan sejumlah langkah untuk menindak yayasan penyalur tenaga kerja rumah tangga.

Misalnya, penindakan terhadap Yayasan PT Val Konsultan Indonesia yang belum mengantongi izin usaha jasa aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga (KBLI 78103).

Meski demikian, penindakan tersebut belum intensif karena maraknya yayasan ilegal yang beroperasi. Imbasnya, kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga, berdasarkan catatan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, meningkat menjadi 2.000 kasus dalam lima tahun terakhir.

Septian mengaku sering menerima aduan tentang persoalan yang dialami perawat lansia. Misalnya, kasus pelecehan oleh yayasan, dan pemotongan gaji perawat.

"Kalau pelecehan, kami laporkan ke polisi. Kewenangan Disnaker hanya memastikan pekerja ditempatkan sesuai pekerjaannya dan tidak diminta biaya dari yayasan sesuai norma ketenagakerjaan."

Septian menjelaskan norma ketenagakerjaan mencakup beberapa aturan seperti penempatan yang tidak diminta biaya, dan pemberian hak dan janji kepada pekerja seperti yang disepakati di awal.

"Kendalanya, ketika sampai ke individu pemberi kerja, kami tidak bisa masuk. Tapi kalau ke yayasan, kami sering menindak. Dan itu sering kita buat di sini," ungkapnya.

Kewenangan Disnaker yang sempit disebut sebagai penyebab utama yang menyulitkan pengambilan tindakan tegas terhadap yayasan-yayasan ilegal.

"Tugas kami terbatas pada pelatihan," kata Septian. Tujuannya adalah mengurangi tindakan yang tidak diinginkan. Selain itu, supaya perawat mendapat sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dinilai berkompeten.

Apa yang Harus Dilakukan?

Berbagai persoalan yang dialami perawat lansia menimbulkan pertanyaan tentang peran pemerintah dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi kerja perawatan.

ILO dalam sebuah risalah yang terbit pada Oktober 2022, menyebut bahwa kerja perawatan berperan penting dalam mendukung Akselerator Global PBB.

Tujuannya adalah perlindungan sosial guna mencapai transisi yang adil, aliansi global untuk perawatan, serta berbagai inisiatif nasional dan internasional lain.

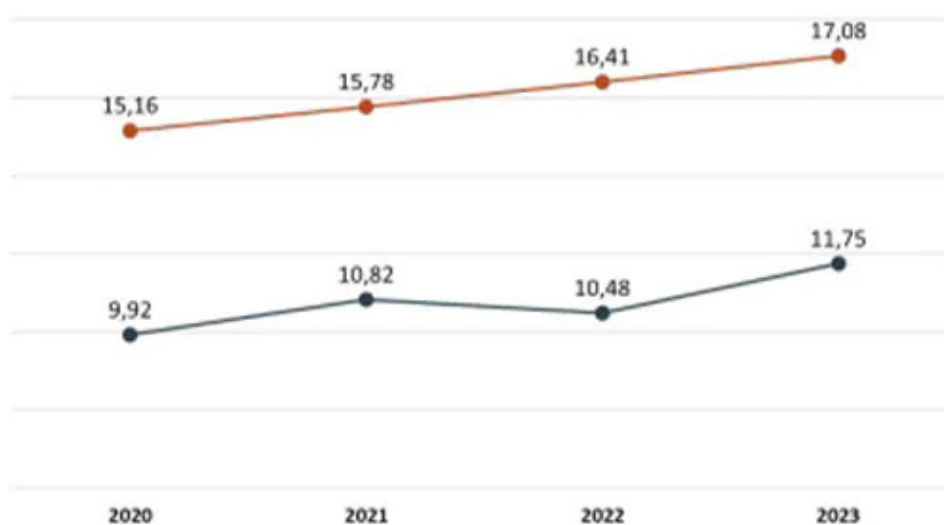
Investasi kerja perawatan juga memperkuat platform program yang bertujuan meningkatkan dan memperluas kebijakan serta layanan perawatan secara berkelanjutan.

Project Officer of Care Economy ILO Indonesia, Early Dewi Nuriana menerangkan pentingnya kerja perawatan dalam tata kelola pembangunan masyarakat dan upaya mencapai inklusivitas.

"Penerapan kebijakan perawatan yang komprehensif dapat mengurangi kesenjangan gender dalam partisipasi tenaga kerja dan membuka peluang lebih luas bagi perempuan di dunia kerja," ungkap Early dalam workshop "Ekonomi Perawatan dari Perspektif Media" di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/01/2024).

Kerja perawatan, khususnya perawat lansia dinilai penting karena Indonesia tengah menghadapi fenomena aging population, di mana jumlah penduduk usia lanjut lebih dari 10 persen dan akan terus bertambah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat populasi penduduk lansia di Indonesia pada 2010 sebanyak 7,6 persen, dan naik drastis pada 2023 menjadi 11,75 persen.



*Grafik peningkatan penduduk lanjut usia di Indonesia selama tahun 2020-2023
(Foto: Dokumentasi BPS)*

Pada 2024, diperkirakan 12 persen penduduk Indonesia tergolong lansia, dengan rasio ketergantungan mencapai 17,08.

“Dengan persentase itu, perawat lansia punya peluang berkontribusi dalam pembangunan nasional dan menciptakan kondisi kerja yang inklusif,” Early menambahkan. Untuk mengakomodasi kerja perawat lansia, diperlukan regulasi yang jelas.

Senada, Septian menilai pengesahan aturan hukum yang spesifik penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pekerja perempuan.

Ia berharap, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bisa segera disahkan supaya ada dasar yang kuat untuk melindungi pekerja, memastikan kewajiban pemberi kerja.

Pengesahan RUU PPRT akan menjadi jalan bagi para pekerja untuk memperoleh hak berupa jaminan kesehatan nasional, seperti BPJS atau BPJS Ketenagakerjaan.

Staf Advokasi Jaringan Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Jumisih, menilai ketiadaan UU PPRT menjadi penyebab maraknya kasus yang menimpa perawat lansia. Selama belum ada hukum yang mendahului, maka ketidakadilan berpotensi muncul.



Sebagian anggota JALA PRT saat sedang beraudensi dengan DPR RI (Foto: Dokumentasi JALA)

"Pelecehan yang dialami perawat lansia disebabkan karena ketiadaan UU PPRT ini," katanya kepada PARBOABOA, Rabu (12/02/2025).

Jumisih menyebut draf UU PPRT memuat sejumlah mekanisme yang mengatur perlindungan terhadap PRT seperti perawat lansia dan baby sitter.

Pasal 7 misalnya, secara spesifik menyebut klasifikasi pekerjaan PRT, termasuk perawat lansia yang patut mendapat perhatian negara.

"Jika ada dasar hukumnya, maka kita punya perlindungan hukum yang kuat untuk melindungi para pekerja," pungkasnya.(*)

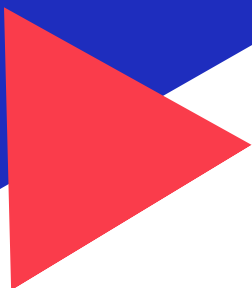
Artikel ini dimuat tanggal 25 Februari 2025

Tautan Artikel:

<https://s.id/PotretBuramPerawatLansiadiJabodetabek>



7



► 07. Taman Pengasuhan Anak, Pondasi Masa Depan

Indriani, Antaranews.com

Jakarta (ANTARA) - Suara canda, tawa, dan teriakan anak-anak terdengar riuh di Taman Pengasuhan Anak (TPA) Beringharjo, Yogyakarta, Senin, 24 Februari 2025.

Di lorong koridor, hentakan kaki kecil bocah yang berlari ke sana-sini, menggema ke seluruh penjuru gedung. Begitulah keseharian tempat penitipan anak usia dini yang ada di Pasar Beringharjo, kawasan Malioboro.

Tak sulit menemukan lokasinya, yakni di sisi selatan pintu utama pasar, berhadapan dengan area parkir. Bangunan bercat putih itu dulunya kantor pengelola pasar. Pada 1980an pasar ini pernah terbakar, lantas direnovasi. Kantor pengelola pindah ke lantai tiga, sehingga bangunan ini sempat terlantar. Hingga akhirnya, pemerintah Kota Yogyakarta menginisiasi pendirian tempat penitipan bagi anak-anak pedagang di pasar tersebut. Papan putih bertuliskan "Tempat Penitipan Anak Beringharjo" menjadi penanda peruntukan baru bangunan ini.



Sejumlah anak beraktivitas di TPA Beringharjo yang terletak di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Senin (24/2/2025) (ANTARA/Indriani)

Koordinator TPA Beringharjo Yustina Suyatni bercerita, taman ini merupakan bagian penting bagi anak-anak pedagang Pasar Beringharjo sejak 1994. TPA berbasis komunitas ini bermula dari keprihatinan Ati Widagdo, istri Wali Kota Yogyakarta saat itu, dan istri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Gusti Kanjeng Ratu Hemas, melihat banyaknya pedagang yang terpaksa membawa anak-anak mereka ke pasar.

Sejak awal pendirian, TPA ini diharapkan bisa membantu para pedagang agar dapat berjualan dengan lebih tenang, sebab, anak-anak mereka diasuh dan mendapatkan pendidikan usia dini yang layak.

“Awalnya, hanya ada 20-30 anak yang diasuh di sini,” tutur Yustina, yang akrab disapa Tini, kepada ANTARA. Memasuki awal 2000-an, jumlah anak yang bergabung merosot drastis hingga tertinggal 8-9 orang saja. “Hampir membuat TPA ini ditutup.”

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dicanangkan pemerintah pada 2006, membangkitkan TPA Beringharjo. Taman ini pun menyesuaikan diri, mengikuti model pendidikan anak usia dini yang diperkenalkan Dinas Pendidikan. Kini, TPA Beringharjo telah berkembang, dan mampu menampung sekitar 60 anak setiap tahun. Pengelola sengaja membatasi karena keterbatasan tenaga pengasuh dan kapasitas ruangan. Padahal, minat orang tua untuk menitipkan anak mereka di sini cukup tinggi, terutama dari kalangan pedagang pasar.

“Banyak yang ingin masuk, tapi tenaga kami terbatas. Terkadang, kami pun harus mengurangi jumlah anak demi memastikan pengasuhan yang optimal,” Tini menambahkan.

TPA Beringharjo tidak hanya menawarkan tempat penitipan, tapi juga menerapkan program pendidikan usia dini seperti literasi, matematika sederhana, serta kegiatan sosial dan motorik.

Setiap hari, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak berkumpul dalam kelompok untuk bernyanyi bersama di ruang tengah. Kemudian makan kudapan pagi, lalu memasuki kelas. Pembagian kelas disesuaikan dengan usia anak, yakni dua tahun hingga enam tahun. Setelah belajar, mereka makan bersama, dilanjutkan dengan sesi bermain.

Jadwal selanjutnya, tidur siang, kemudian mandi pada sore hari. Semua kegiatan dilakukan secara rutin, sehingga, saat dijemput orang tua, anak-anak sudah dalam keadaan bersih dan segar.

Setiap hari, anak-anak mengikuti kegiatan yang telah dijadwalkan, mulai dari sarapan, bermain bersama, belajar membaca dan menulis, hingga kegiatan seni dan olahraga ringan. Selain itu, TPA juga memperkenalkan makanan tradisional sebagai bagian dari edukasi kuliner kepada anak-anak.

Selain agenda harian, TPA Beringharjo mengundang komunitas dari luar untuk memberi pengalaman belajar yang lebih beragam. Misalnya, program literasi, bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta yang secara rutin mengadakan sesi membaca cerita untuk anak-anak. Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) juga kerap datang untuk berbagi ilmu dan bermain bersama anak-anak.

Meski dikelola oleh PKK Kota Yogyakarta, pengelolaan TPA Beringharjo tetap menerapkan pola kontribusi orang tua. Namun, iurannya terjangkau, yakni Rp 5.000 per hari. Dana ini digunakan untuk menunjang kegiatan anak-anak. Jika anak tidak hadir, maka tidak ada biaya yang harus dibayar.

“Ini sebenarnya bukan biaya, karena nanti akan dikembalikan dalam bentuk makan siang dan kudapan bagi anak,” terang Tini.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), pada September 2024, melakukan standarisasi dan menetapkan TPA Beringharjo sebagai Taman Asuh Ramah Anak (TARA) dengan peringkat Nindya.

TARA merupakan fasilitas kesejahteraan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan, pendidikan, dan bimbingan tumbuh kembang anak usia 0 – 6 tahun yang menerapkan prinsip pemenuhan hak dan perlindungan anak. TARA meliputi tempat penitipan anak, taman penitipan anak, taman anak sejahtera, taman pengasuhan anak, dan daycare.

TPA Seri Derma

Senada dengan TP Beringharjo, TPA Seri Derma yang berlokasi di Umbulharjo, Yogyakarta juga menawarkan layanan penitipan anak yang terjangkau.

TPA yang berada di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Anak dan Remaja (YKAR) Kongres Wanita Indonesia (Kowani) itu menempati kawasan cagar budaya yang asri. TPA ini murni dikelola swasta, dengan biaya Rp 600 ribu per bulan, per anak. Biaya pendidikan itu sudah termasuk makan siang dan kudapan sehat.

Jika dibandingkan TPA lain yang dikelola swasta di Yogyakarta, TPA Seri Derma ini bisa dikatakan terjangkau. “Biaya penitipan anak di Yogyakarta sekarang sudah di atas Rp 1 juta,” kata Kepala Sekolah Seri Derma, Riya Cahyani.

Saat ini, TPA Seri Derma mengurus 23 anak yang dibagi ke dalam tiga kelas. Pertama, kelas bayi untuk anak usia dua bulan hingga setahun. Kedua, kelas batita untuk anak usia dua tahun. Ketiga, kelompok bermain untuk anak usia tiga tahun.

Sama seperti TPA Beringharjo, Seri Derma tak hanya menawarkan layanan pengasuhan, tapi juga pengenalan materi membaca, menulis, dan berhitung. Lembaga ini berkolaborasi dengan sejumlah pihak agar layanan penitipan anak lebih optimal. Menurut Riya, mayoritas bocah yang dititipkan di sini adalah anak yang ibunya bekerja sebagai ASN, guru, tenaga kesehatan, hingga pekerja swasta di Yogyakarta.

Seri Derma punya enam guru yang berlatar belakang pendidikan SMA hingga sarjana. Para guru telah dibekali pendidikan kilat dan bersertifikasi dari Dinas Pendidikan. Para guru mendapat gaji dari yayasan sebesar Rp 1 juta.

Riya mengatakan, nominal itu sebenarnya belum sesuai dengan beban kerja yang harus dihadapi, karena pekerjaan berat seperti mengasuh anak, menyuapi anak, hingga memandikan anak. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menambah gaji para guru yakni melalui bantuan insentif guru non ASN yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp200.000 per bulan.

Layanan Terintegrasi



Aktivitas anak beserta guru di TPA Seri Derma Yogyakarta (ANTARA/HO-TPA Seri Derma)

Layanan penitipan anak tak hanya ada di TPA, tapi juga Taman Anak Sejahtera (TAS) yang menawarkan layanan perawatan, pengasuhan, dan perlindungan bagi anak usia tiga bulan hingga delapan tahun. Keberadaan TAS dikembangkan Kementerian Sosial sejak 1963, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan, pembinaan, bimbingan sosial anak balita selama anak tidak bersama orang tua.

TAS juga berperan sebagai tempat perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan sosial, anak terlantar, korban kekerasan hingga tempat bagi anak yang kedua orang tuanya meninggal. Melalui TAS, anak-anak tersebut dibantu membuat akte kelahiran.

Ketua Forum TAS Indonesia Alifatun Mardiyah mencontohkan, saat terjadi bencana di Palu pada 2018. Di daerah itu ternyata tidak ada panti balita dan akhirnya dititipkan di TAS," katanya.

TAS juga membantu mengedukasi orang tua memahami pola pengasuhan melalui program penguatan anak dan keluarga. Saat ini, TAS di Indonesia telah berkembang menjadi 208 satuan. Namun jumlah itu terus merosot sejak Kementerian Sosial tidak lagi memberikan bantuan pada TAS tepatnya sejak 2019. Banyak TAS yang gonta-ganti menjadi TPA.

Biaya penitipan di TAS sesuai layanan yang diambil. Jasa penitipan anak sehari penuh dikenakan biaya Rp 300 ribu per bulan, termasuk makan dua kali sehari. Sedangkan biaya jasa penitipan harian Rp 15 ribu per hari, dan setengah hari dikenakan biaya Rp 10 ribu. Khusus untuk keluarga tak mampu, gratis.

Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA (Uhamka), Rita Pranawati, mengatakan penyediaan dan pengawasan terhadap layanan penitipan anak mendesak dilakukan, apalagi telah ada Peta Jalan Ekonomi Perawatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (UU KIA).

Layanan penitipan anak yang aman dan terjangkau sangat dibutuhkan seiring meningkatnya partisipasi perempuan di dunia kerja, dan perubahan situasi keluarga yang berdampak pada pengasuhan anak.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik, pada 2021, sebanyak 66,36 persen perempuan bekerja di sektor informal dan 33,64 persen di sektor formal. Sedangkan laki laki 53,68 persen di sektor informal dan 46,32 di sektor formal.

Tanggung jawab akan perawatan rumah dan keluarga kerap menjadi salah satu penghambat partisipasi perempuan. Belum lagi norma sosial menempatkan perempuan sebagai pengasuh utama. Kondisi itu juga dihadapkan pada kenyataan akan sulitnya mencari Asisten Rumah Tangga (ART). Persoalan lainnya, lingkungan kerja yang kurang mendukung.

“Padahal pengasuhan merupakan pondasi dalam pemenuhan hak. Agar hak anak dan kesejahteraannya terpenuhi,” ujar Rita.

Ia menjelaskan prinsip perlindungan anak meliputi empat hal yakni non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang, serta partisipasi anak.

Rita menilai perlu manajemen pengasuhan untuk mengatasi situasi pengasuhan yang beragam, baik pengalihan pengasuhan temporer maupun permanen. Data BPS pada 2020 menunjukkan, 4 hingga 5 dari 100 anak usia nol sampai 17 tahun tidak tinggal bersama kedua orang tuanya (4,82 persen).

"Pertumbuhan layanan penitipan anak perlu diapresiasi sebagai alternatif solusi pengasuhan terutama pada masa emas kehidupan anak," Rita menambahkan.

Masalahnya, belum semua layanan sesuai standar dan aturan yang berlaku, dan ketersediaan masih terpusat di Jawa. Sebanyak 44 persen layanan penitipan anak belum memiliki legalitas. Baru 30 persen layanan penitipan anak yang memiliki izin operasional, 12 persen memiliki tanda daftar, dan 13,3 persen memiliki badan hukum.

Mantan komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dua periode itu mengungkapkan, masih ada layanan penitipan anak yang dikelola secara sederhana, bahkan tidak punya kegiatan rutin dan jadwal layanan. Kondisi itu dapat membuat orang tua menjadi kurang percaya untuk menitipkan anak.

Tantangan lain, biaya TPA/TPS terutama di kota besar yang mahal. Di Jakarta sebut saja, untuk penitipan anak yang bagus minimal harus merogoh kocek di atas Rp2 juta. Bagi perempuan pekerja yang mendapatkan upah minimum, tentu saja biaya itu cukup memberatkan.

Karena itu, perlu upaya advokasi dan dukungan pemerintah maupun pemberi kerja agar tersedia layanan penitipan anak yang terjangkau dan bisa diakses masyarakat. Idealnya, pemerintah dan perusahaan bergotong-royong mensubsidi layanan penitipan anak tersebut, seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta di TPA Beringharjo.

Juga perlu advokasi terhadap perizinan pengelolaan layanan penitipan anak, standarisasi kelembagaan, hingga sumber daya manusia pengelola dan pelayanan pengelolaan.

Dari sisi sumber daya manusia, sertifikasi pengasuh mutlak diperlukan. Sebab, tugas pengasuh tidak hanya memberi makan atau mengganti popok bocah, tapi juga aspek psikologis dan tumbuh kembang anak.

Dalam pengelolaan TPA/TAS atau pun daycare juga menerapkan perspektif perlindungan anak. Pemerintah juga perlu mengatur, menstandarisasi, melatih, dan mendampingi dalam pengelolaan.

Selain itu, perlu koordinasi antarkementerian dan lembaga pemerintah, agar layanan terintegrasi. Saat ini, jasa penitipan anak setidaknya ada di tiga kementerian yakni Kementerian PPPA dengan layanan Taman Asuh Ceria (TARA), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui TPA, dan Kementerian Sosial melalui TAS.

Jika pemerintah ingin Indonesia Emas pada 2045 terwujud, maka persoalan layanan penitipan anak yang aman dan terjangkau perlu mendapat perhatian serius. Sejumlah studi menunjukkan, kesuksesan pendidikan anak usia dini menentukan kesuksesan di masa depan.(*)

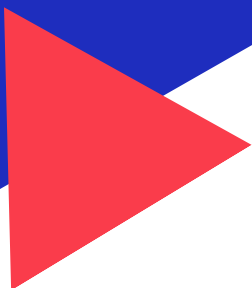
Artikel ini dimuat tanggal 26 Februari 2025

Tautan Artikel:

<https://s.id/Tamanpengasuhananakpondasimasadepan>



8



► 08. Kisah Caregiver, 'Malaikat' Penjaga Kala Usia Senja

Feni Freycinetia Fitriani, plus.bisnis.com

Peningkatan jumlah penduduk usia tua di Indonesia dapat berdampak pada naiknya kebutuhan akan tenaga caregiver.

Perempuan tua itu terlihat duduk di kursi kayu di teras rumah nan teduh dengan pepohonan hijau. Wajahnya tetap segar, meski usianya sudah tak lagi muda. Rambut sebahu disisir belah tengah, dibiarkan menjuntai di sisi kiri dan kanan. Kelopak mata dan pipinya dipoles perona jingga. Bak anak perawan yang sedang jatuh cinta. Sese kali dia tersenyum, tapi sorot matanya memperlihatkan kegelisahan.

“Suami saya kapan datang? Dia sudah janji mau ketemu saya hari ini. Kenapa belum tiba juga? Jangan-jangan dia lupa,” ujar perempuan paruh baya itu sambil sesekali melirik ke arah pagar yang berbatasan dengan jalan raya.

Bu Ci, nama panggilannya. Usianya 70 tahun. Dia berasal dari Bandung. Para perawat lansia atau caregiver yang masih belia sering menyapanya ‘Oma’. Ia merupakan salah satu penghuni Bright Dementia Active Care, fasilitas panti jompo atau senior living khusus bagi lansia demensia, yang berlokasi di Ciawi, Bogor.

Seorang caregiver lantas mengajak Oma masuk ke bagian dalam hunian, yang sebelumnya difungsikan sebagai hotel tersebut. Sambil bergandengan tangan, mereka beralih ke teras dalam yang bersisian dengan kolam renang. Lima menit berselang, sosok yang ditunggu akhirnya datang.

“Bu Ci..” teriak seorang pria paruh baya dengan rambut putih itu. Oma langsung bergegas menuju ruang tengah dengan desain sirkular. Keduanya langsung berpelukan erat. Air mata menetes dari kedua mata Bu Ci, tapi ekspresinya menunjukkan perasaan bahagia. Pria itu adalah Rudianto Oetomo, suami yang sudah dinantinya sehari-hari.

Bu Ci sudah lebih dari sebulan tinggal di Bright Dementia Active Care. Rudi sendiri yang membawa istrinya ke sana pada awal tahun ini. Sejak November 2024, Rudi melihat sejumlah gejala aneh pada istrinya, yang membuat dia dan keluarganya bingung. Awalnya, sang istri hanya pikun dan sering melamun. Namun, tidak sampai satu bulan, kondisi Bu Ci semakin memburuk lantaran mulai sering tantrum dan berhalusinasi.

“Psikiater bilang bahwa istri saya masuk demensia alzheimer,” kata Rudi. Awalnya dia mencari tempat perawatan sementara untuk istrinya di Bandung, tetapi tidak ada yang sreg. Akhirnya, salah satu anaknya menemukan fasilitas senior living di Ciawi. “Sepertinya metode di sini cocok untuk penyembuhan istri saya.”

Setelah menjalani perawatan dengan pendekatan holistik dan penanganan kekeluargaan yang tinggi di panti itu, Rudi menilai kondisi istrinya kian membaik. Kesehatan serta gejala demensia yang diderita istrinya tak lagi seburuk dulu. Menurut Rudi, hal ini terjadi, salah satunya berkat perhatian dari para caregiver.

Perawat lansia di Bright Dementia Active Care tampak begitu cekatan dan perhatian saat merawat dan menemani para “pasien” mereka. Padahal, selisih usia caregiver dengan para lansia sangat jauh. Rata-rata para caregiver di sana masuk dalam klasifikasi generasi Z (Gen Z), alias anak-anak muda yang lahir pada 2007-2012.

Tak ada kecanggungan saat para caregiver ini membantu orang-orang yang lebih pantas menjadi oma dan opa mereka itu. Misalnya Yulianingsih, yang menemani Bu Ci sampai suaminya datang. Yuli, sapaan akrabnya, dengan sabar menenangkan Bu Ci ketika perempuan itu mulai gelisah. Ia juga tak pernah berhenti menemani warga senior itu kala mengelilingi setiap sudut ruangan hingga taman di luar.

“Saya enggak tahu bagaimana nasib istri saya kalau enggak ditangani caregiver,” kata Rudi.

Keahlian para caregiver bukan hanya dalam urusan menjaga kesabaran dan kreativitas untuk menjaga suasana hati para pasien mereka. Mereka juga dituntut memiliki fisik yang prima, karena mereka harus membantu para lansia ketika hendak ke kamar kecil atau aktivitas lainnya.

“Satu lagi, mereka enggak boleh dendam,” kata Rudi. Ini poin penting, karena menurut dia, jika istrinya bisa memukul orang ketika sedang tak sadar. “Saya berutang budi kepada mereka.”



Pasangan warga senior didampingi oleh caregiver di area BRIGHT Dementia Active Care Ciawi, Bogor, Jawa Barat. JIBI/Feni Freycinetia

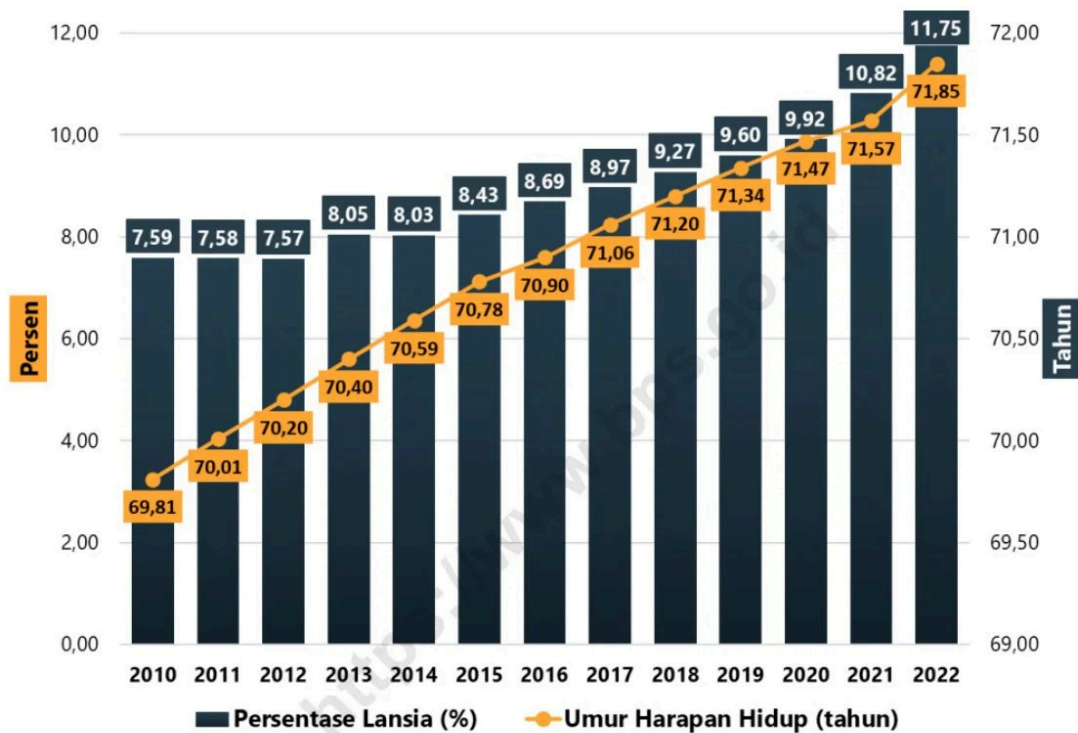
Pentingnya Ekonomi Perawatan saat Populasi Menua

Rudi dan istrinya adalah bagian dari 11,75% penduduk Indonesia yang masuk ke dalam golongan lansia. Mengacu pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), jumlah lansia di Indonesia pada 2023 sudah sekitar 28 juta penduduk.

Saat ini, Indonesia sudah memasuki fase penuaan populasi atau ageing population. Fase ini ditandai dengan penambahan populasi lansia secara bertahap-kondisi yang sebetulnya sudah terjadi di Indonesia sejak 2021.

Bahkan, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyampaikan bahwa jumlah lansia di Indonesia bakal mencapai 20% atau sekitar 50 juta jiwa pada 20 tahun mendatang.

Sayangnya, isu ageing population yang dihadapi Indonesia ini sepertinya kalah dengan gambar-gambar visi Indonesia Emas 2045, yang lebih berfokus pada populasi penduduk usia produktif. Lantas, di mana sebenarnya posisi penduduk lansia saat ini?



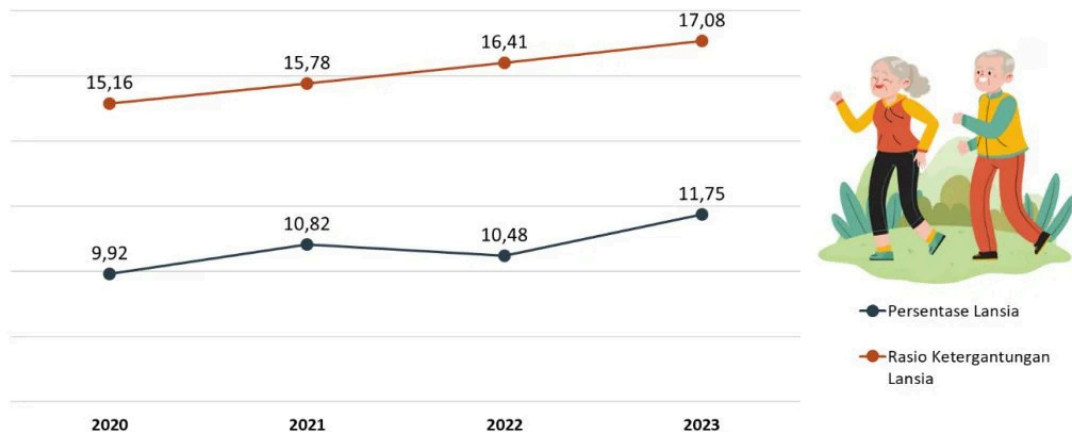
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2010-2022

Badan Pusat Statistik, IPM metode baru 2010-2022 (bps.go.id)

Secara umum, rasio ketergantungan lansia meningkat seiring dengan kenaikan persentase lansia. Pada 2023, rasio ketergantungan lansia sebesar 17,08. Artinya, 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 17 lansia. Dengan kata lain, satu orang lansia didukung oleh enam penduduk usia produktif.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Persentase lansia Indonesia mengalami kenaikan setidaknya 4% selama lebih dari satu dekade (2010-2022). Pada 2010, jumlah lansia di Indonesia tercatat baru 7,59% dengan rata-rata angka harapan hidup 69,81 tahun. Adapun, Indonesia resmi masuk dalam kategori ageing population lantaran jumlah lansia menyentuh angka 10% pada 2021.

Kondisi penuaan penduduk menimbulkan tantangan yang harus dihadapi oleh lansia dan anggota keluarganya. Tanggung jawab untuk mengurus orang tua biasanya dibebankan kepada anggota keluarga, khususnya perempuan, tanpa bayaran. Padahal, kerja-kerja keperawatan justru menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020-2023 dan Diolah dari Publikasi Proyeksi Penduduk 2020-2050

Gambar 2.2 Tren Persentase Lansia dan Rasio Ketergantungan Lansia, 2020-2023

International Labour Organization (ILO) mendefinisikan ekonomi keperawatan sebagai kegiatan memproduksi layanan dan barang untuk memenuhi kesejahteraan fisik, psikologis, sosial individu agar dapat memberikan dampak optimal, berkemampuan, nyaman, dan aman.

Pada 2013, standar statistik ketenagakerjaan internasional menetapkan bahwa perawatan yang tidak dibayar pun dikategorikan sebagai pekerjaan, karena memiliki nilai produktif dan berkontribusi pada produktivitas individu.

National Project Coordinator on Care Economy ILO Indonesia Early Dewi Nuriana mengatakan bahwa pekerjaan untuk merawat lansia tanpa bayaran, tetaplah sebuah pekerjaan.

Sayangnya bagi sebagian masyarakat Indonesia, perawatan orang tua justru bagian dari sosial kultural. Konsep tersebut juga berdampak pada profesi keperawatan secara luas.

“Data menjadi salah satu masalah yang dihadapi dalam ekonomi keperawatan di Indonesia. [Saat ini] Profesi caregiver tidak masuk klasifikasi pekerjaan. Bahkan, pekerja rumah tangga [PRT] belum masuk dalam sistem. BPS harus mulai mendata mereka sehingga akan terlihat tingkat partisipasi bahwa pekerja yang mengurus anak dan lansia masuk ke dalam [klasifikasi] pekerjaan formal,” ujar Early.

Oleh karena itu, dia memberi saran agar pemerintah Indonesia mulai memberikan perhatian bahkan investasi lebih terhadap ekonomi keperawatan. Menurutnya, investasi negara pada sektor ini dapat menciptakan banyak lapangan kerja baru bagi masyarakat. Apalagi, saat ini Indonesia dilanda ‘badai’ pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tutupnya pabrik-pabrik manufaktur di berbagai daerah.

Early mengatakan biasanya isu-isu kesetaraan gender jarang dikaitkan dengan ekonomi. Padahal, lanjutnya, bisa terjadi transisi dari pekerja informal ke pekerja formal apabila pemerintah lebih memerhatikan sertifikasi dan pemberian skema perlindungan sosial, salah satunya BPJS, bagi para caregiver.

Bahkan, ILO memprediksi bahwa investasi di sektor ekonomi keperawatan, khususnya jasa pengasuhan anak dan caregiver lansia, dapat menciptakan 10,8 juta lapangan pekerjaan baru pada 2035.

Kala Caregiver Gen Z Menemani ‘Opa dan Oma’

Jalan raya di kawasan Ciawi, Gadog, Kabupaten Bogor Jawa Barat tak pernah sepi. Ribuan kendaraan roda dua dan roda empat lalu-lalang untuk menuju ke arah Puncak, destinasi wisata favorit warga Jakarta dan sekitarnya.

Sempat tersasar dan kebingungan, saya terus menyusuri jalan yang lebih kecil untuk mencapai lokasi peliputan hari itu. Saya mencoba menerka dimana letak plang Bright Dementia Active Care, tapi tak kunjung menemukannya.

Saya berbelok ke sebuah bangunan tua dengan jalan masuk yang dipenuhi pepohonan rimbun. Dari jalan setapak yang hanya dapat dilewati satu mobil, bagian dalam bangunan tersebut ternyata lebih luas dari perkiraan.

Ada rumah besar yang berada di tengah taman. Tampilannya seperti hotel melati yang pernah berjaya di era 80-an atau 90-an. Kombinasi antara furnitur jati yang 'jadul' lantai teraso membuat saya seperti memasuki rumah 'eyang'.

Meskipun terlihat tua, kondisi di ruangan tersebut sangat bersih dan rapi.

Di dalamnya terdapat ruang tamu, meja makan panjang dari kayu, kamar-kamar, dapur, serta ruang tengah bergaya retro dengan desain sofa sirkular berwarna biru pastel.

Di sebelah kiri rumah, terdapat kolam renang berukuran sedang dan taman yang semakin hangat penuh pancaran matahari.

Sekitar pukul 10.00 WIB, tiga orang warga lansia, yang terdiri dari dua orang pria dan satu orang perempuan, keluar dari pintu samping menuju tanah kosong di samping rumah.

Para 'oma dan opa' ini tak sendirian, justru mereka didampingi oleh 5 orang anak-anak muda yang menuntun jalan dengan hati-hati.

Alih-alih berprofesi sebagai caregiver, mereka terlihat seperti cucu yang sedang menemani kakek-neneknya.

Seorang caregiver menyiapkan tiga kursi merah untuk tempat duduk para lansia. Satu orang membawa balon oranye. Ternyata, caregiver 'Gen Z' ini sedang mengajak warga senior untuk beraktivitas sambil bermain lempar tangkap bola.

Sambil diiringi musik yang ceria, terekam gelak tawa dan senyuman dari para perawat dan lansia, yang usia mungkin terpaut setengah abad itu.

"Ayo Eyang.. Tangkap bolanya. Oma juga jangan mau kalah, ya," ujar seorang caregiver yang perempuan mengenakan seragam kaos polo coklat muda, celana hitam, dan jilbab manset warna senada.



Caregiver berusia muda alias Gen Z beraktivitas dan bermain bersama warga senior yang tinggal di BRIGHT Dementia Active Care Ciawi, Bogor, Jawa Barat. JIBI/Feni Freycinetia

Shyane Onggo, pemilik BRIGHT Senior Management menjelaskan aktivitas bermain yang dilakukan oleh caregiver dan warga lansia merupakan bagian dari program harian atau daily activity yang dijalankan di fasilitas senior living miliknya.

Menurut dia, layanan yang didapat oleh pasien dengan demensia dan alzheimer berbeda dengan warga senior di panti jompo pada umumnya.

BRIGHT Senior Management merupakan salah satu perusahaan rintisan (startup) yang bergerak di layanan warga senior. Meski berdiri sejak 2021, dia menuturkan perusahaan tersebut baru fokus mengembangkan layanan untuk pasien demensia pada 2024. Dia mengingatkan bahwa lansia yang mengalami demensia memiliki kerusakan pada saraf otak, bukan jiwa.

“Jadi kalau perawat tidak benar-benar care untuk memahami kondisi tersebut, lansia dengan demensia ini tahu dan merasakan ini caregiver baik dan tulus. Caregiver juga harus punya pemikiran bahwa lansia dengan demensia ini sakit, jadi bukan karena orangnya jahat,” ujar perempuan berkacamata tersebut.

Saat ini, Shyane menuturkan ada empat layanan yang ditawarkan, yaitu Stay in BRIGHT Dementia Active Care Ciawi, Day Care membership BRIGHT Dementia Club Ciawi, BRIGHT Home Care Solutions, dan BRIGHT Senior Active Care Bogor.

Masing-masing layanan memiliki tarif atau biaya yang berbeda-beda, yaitu mulai Rp3 juta per orang per bulan untuk day care; Rp5,5 juta per orang per bulan untuk home care; Rp23 juta per orang per bulan untuk stay in dementia care, dan Rp33 juta per orang per bulan untuk senior active care.

Sebelum menitipkan lansia, Shyane akan melakukan tahapan assessment terkait kondisi pasien tersebut, mulai dari wawancara dengan pihak keluarga, tes kesehatan, hingga akhirnya warga senior dapat mengikuti uji coba atau trial kegiatan yang tersedia di BRIGHT Senior Management.

Selain memiliki caregiver berpengalaman, layanan BRIGHT Senior Management juga mendapat supervisi dari dr. M. Sedijono, SpPD (K) Geriatri. Dia merupakan dokter spesialis penyakit dalam yang berfokus pada geriatri atau penyakit lanjut usia.

Menurut Shyane, fokus utama bisnis senior living merupakan pelayanan jasa kesehatan untuk kalangan orang tua yang memiliki sensitivitas tinggi, baik dari sisi fisik maupun perasaan.

Menurutnya, keluarga yang datang ke BRIGHT Dementia Active Care tidak terlalu mempermasalahkan nominal, tetapi bagaimana penyedia layanan dan caregiver dapat memberikan kasih sayang kepada orang tua mereka.

"Kami bukan menggantikan peran keluarga, tetapi melengkapi kebutuhan lansia," ucapnya.

Shyane menuturkan salah satu tantangan yang dihadapi penyedia layanan bisnis senior living bukan sekadar mengenali kondisi konsumen, tetapi para staf yang sebagian besar berprofesi sebagai caregiver. Untuk layanan yang menginap atau stay in, caregiver bertanggung jawab untuk menjaga warga senior selama 24/7 dengan sistem kerja yang dibagi menjadi 3 shift.

"Mungkin kami ini mesin, tapi mereka [caregiver] motor utamanya," ucapnya.

Shyane pun mengungkapkan alasan merekrut caregiver dari kalangan Gen Z untuk merawat empat orang warga lansia di BRIGHT Dementia Active Care Ciawi.

Perawatan lansia dengan demensia alzheimer, lanjutnya, bukanlah perkara mudah. Selain butuh fisik yang kuat, caregiver harus memiliki kesabaran dan rasa hormat terhadap warga senior yang mereka rawat.

Menurutnya, caregiver Gen Z atau yang baru lulus dari sekolah menengah khusus (SMK) masih memiliki rasa hormat terhadap orang tua dibandingkan perawat yang lebih senior. Bahkan, kata dia, ada Gen Z yang ingin menjadi caregiver bukan sekadar mencari uang, tetapi mendapat pengalaman sebelum nanti mereka mengurus orang tua di rumah.

Shyane dan rekannya juga sering membuka sesi 'curhat' dengan caregiver muda untuk mengetahui apa saja kendala yang mereka hadapi saat merawat warga senior. Selain itu, dia juga sering meminta masukan dari pekerja terkait aktivitas atau permainan yang bisa mereka jalankan dengan pasien.

"Anak muda itu inginnya kerja fun. Nah, gimana caranya kami membuat program yang cocok buat senior, tetapi juga menyenangkan untuk caregiver ini. Yang penting semua cerita, semua pihak happy," ucapnya.

Yulianingsih, salah satu caregiver Gen Z, menceritakan alasannya ingin bekerja sebagai perawat lansia. Gadis berusia 19 tahun itu bersekolah di SMK Kesehatan Al-Ikhlas, Cisarua, dan mengambil jurusan Asisten Keperawatan & Caregiver.

Yulia, sapaan akrabnya, mengaku tertarik untuk menjadi caregiver karena dorongan dari orang tua. Selain itu, Yulia mengatakan terpikir menjadi caregiver karena ada tetangganya yang sudah bekerja perawat dan saat ini memiliki karier yang cukup baik.

"Orang tua bilang saya cocok jadi caregiver karena saya sabar. Saya juga lihat ada tetangga yang kerja di bidang ini dan sekarang sukses. Yah, bisa jadi motivasi saya juga," ujar Yulia ketika ditemui di sela-sela shift.

Senada dengan Yulia, Rahmi Rahmawati (19 tahun) juga mantap memilih profesi caregiver di usianya yang masih muda. Rahmi mengaku alasan dirinya terjun ke bidang perawatan kesehatan agar tidak kaget saat harus menemani dan merawat orang tua yang sudah sepuh di rumah.

Saat bersekolah di SMK, Yulia dan Rahmi mengatakan mempelajari soal kebutuhan dasar manusia (KDM), khususnya lansia. Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan warga senior lantaran kondisi fisik dan sosial yang sudah menurun.

Untuk menjadi caregiver yang baik, lanjutnya, dia harus melakukan pendekatan secara personal kepada pasien lansia. Misalnya mendengarkan saat mereka cerita, walaupun sering kali melantur.

Sebelum bergabung dengan BRIGHT Dementia Active Care, Yulia dan Rahmi sudah pernah magang di Rukun Senior Living yang berlokasi di Sentul, Bogor. Di sana, mereka mendapat pengalaman untuk mengurus lansia selama tiga bulan.

Ketika ditanya soal suka-duka saat menjadi caregiver khusus pasien demensia alzheimer, keduanya kompak menjawab tantangan utama adalah menjaga emosional.

Menurut mereka, caregiver lansia dengan demensia harus sabar dan mampu menahan diri. Selain itu, mereka juga harus bisa menahan ego di hadapan warga senior.

Yulia mengatakan kerja menjadi caregiver di senior living tidak monoton karena banyak kegiatan yang dilakukan dengan warga lansia.

BRIGHT Dementia Active Care menyediakan tiga shift, yaitu pagi (07.00-16.00 WIB), siang (10.00-20.00 WIB), dan malam (20.00-08.00 WIB) untuk para caregiver.

Untuk gaji, para caregiver di senior living yang baru lulus SMK menerima gaji di kisaran Rp2 juta sebulan. Gaji tersebut masih di bawah upah minimum regional (UMR) Kabupaten Cianjur 2024 sekitar Rp2.915.105.

"Gajinya memang tidak terlalu besar, tapi cukup. Saya enjoy dengan pekerjaan ini. Kalau ada rezeki, saya ingin kuliah keperawatan. Saya yakin peluang kerja sebagai caregiver di Indonesia ini sangat banyak, termasuk di luar negeri seperti Jepang dan Singapura," imbuh Yulia.



*Pasangan warga senior didampingi oleh caregiver yang bernama Yulianingsih di area
BRIGHT Dementia Active Care Ciawi, Bogor, Jawa Barat. JIBI/Feni Freycinetia*

Tetap Aktif dan Produktif di Day Care Lansia

Layanan dan fasilitas untuk lansia terus bermunculan di berbagai wilayah. Selain perusahaan yang bergerak di bidang senior living, ternyata ada komunitas yang menyediakan program menarik agar lansia agar tetap aktif di masa tua, salah satunya Tenteram Senior Care (TSC).

Berbeda dengan panti jompo pada umumnya, Tenteram Senior Care merupakan layanan day care yang menawarkan wadah berkumpul para lansia dimana mereka bertemu dan mendapatkan teman berbicara, aktivitas bermain sehingga dapat menjadi lansia yg bahagia, sehat dan berdaya. Aktivitas TSC saat dilakukan di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), Depok, Jawa Barat.

Direktur Tenteram Senior Care Yanti Djani mengatakan inisiasi untuk membentuk TSC teretus saat reuni 40 tahun alumni Fakultas Ekonomi UI angkatan 1983 atau yang dikenal dengan Wonder83. Yanti, Velly, dan Helmy, yang merupakan bagian dari Wonder83, bercita-cita ingin membangun griya untuk menghabiskan masa tua bersama teman-teman seangkatan saat kuliah.

“Awalnya, kami ingin membangun senior living, tetapi perizinan cukup rumit dan biayanya lumayan besar. Akhirnya, kami sepakat untuk membuat day care yang bisa menjadi ruang beraktivitas bagi lansia, termasuk teman-teman Wonder83,” kata Yanti saat ditemui Bisnis di RSUI Depok.

Yanti dan teman-temannya awalnya kebingungan mencari tempat untuk operasional Tenteram Senior Care. Untungnya, mereka bertemu dengan dokter Astrid yang menawarkan lokasi kegiatan di Gedung Administrasi RSUI lantai 4.

Akhirnya, day care lansia Tenteram Senior Care resmi beroperasi pada 29 Mei 2024.

TSM mengusung Program Aktivitas Usia Lanjut (PAUL) yang mencakup tiga hal utama, yaitu olah tubuh (brain gym, body percussion, pound fit untuk lansia, body movement, line dance), olah rasa (informasi kesehatan, pengenalan diri, pembelajaran hidup dari inspiring seniors), dan olah pikir (aktivitas seni dan kerajinan tangan serta mengenali kebudayaan).

Yanti mengaku program PAUL terinspirasi dari senior day care yang ada di Jenewa dan New York yang pernah dikunjunginya semasa tinggal di luar negeri.

Untuk saat ini, kata Yanti, kegiatan TSM dilakukan selama satu minggu sekali, yaitu setiap Rabu mulai pukul 09.00-15.00 WIB. Lantaran keterbatasan tempat dan staf, TSM membatasi jumlah lansia yang bisa mengikuti kegiatan hanya 15 orang untuk setiap pertemuan.

Adapun, kategori lansia yang masih bisa mengikuti kegiatan, yakni lansia muda (60-70 tahun), lansia madya (70-80 tahun), dan lansia paripurna (di atas 91 tahun). Agenda PAUL awalnya dirancang untuk lansia muda dan madya yang bisa berkegiatan mandiri.

“Namun, dalam perkembangannya saat ini juga diikuti peserta di atas 80 tahun dan peserta yang berkegiatan dengan didampingi anggota keluarga atau caregiver pribadi. Peserta tertua berusia 91 tahun namanya Bapak Bambang,” jelasnya.

Kegiatan di TSM pada Rabu dimulai dengan registrasi, pemeriksaan tanda-tanda vital, yang dilanjutkan dengan brain gym. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menstimulasi otak dan motorik warga senior.

Tidak lama, muncul dokter dari RSUI yang memberikan informasi kesehatan tentang gejala vertigo pada lansia. Jelang istirahat makan siang, panitia mengajak 15 orang warga senior yang sebagian besar perempuan untuk bergerak dengan senam ringan di atas kursi. Day care di TSC juga menyediakan makan siang dan kudapan bergizi seimbang khusus lansia dari Dapur Gizi RSUI.

Setelah makan siang, kegiatan lansia dilanjutkan dengan kesenian dan fun games yang di akhiri pada pukul 15.00 WIB.

Yanti mengatakan lansia yang ingin mengikuti program day care TSM akan diterapkan biaya sebesar Rp300.000 per hari atau Rp1 juta per 4 kali kedatangan. Meski demikian, dia mengakui bahwa biaya operasional sebenarnya atau actual cost mencapai Rp450.000 per orang.

Namun, untuk mengakomodasi warga lansia yang keuangannya terbatas kami memberikan diskon 30% sehingga menjadi Rp210.000 per kedatangan atau Rp700.000 untuk 4 kali kedatangan.



Warga lansia melakukan olah tubuh bersama yang dilaksanakan oleh Tenteram Senior Care (TSC) di Gedung Administrasi Lantai 4 RSUI Depok, Jawa Barat. JIBI/Feni Freycinetia

“Saat ini, pendanaan masih swadaya dari alumni FE UI 83 dan donatur Consulting Servicer Indonesia dan Zero Sixers Cycling Club [komunitas goweser Alumni FEBUI. Kami berharap ada pihak-pihak lain yang ikut serta dalam mendukung aktivitas lansia,” ujar Yanti.

Caregiver jadi Solusi di Tengah Tren PHK?

Peningkatan jumlah penduduk senior di Indonesia dapat memberikan dampak pada jasa perawatan lansia, termasuk naiknya kebutuhan akan tenaga caregiver. Selama ini, profesi caregiver di luar negeri, seperti Jepang, Eropa, dan Singapura, lebih diminati lantaran standar gaji yang tinggi. Seiring masuknya RI dalam kategori ageing population, permintaan caregiver di dalam negeri ternyata terus bertambah.

Hal itulah yang dirasakan oleh Munaroh. Perempuan berusia 38 tahun asal Brebes, Jawa Tengah mengaku sudah 12 tahun terakhir berprofesi sebagai caregiver. Berbeda dengan Yulia dan Rahmi, Mbak Mun, sapaan akrabnya, memilih jalur home care atau perawat yang dipekerjakan untuk satu pasien lansia di rumah.

Pekerjaan caregiver home care cukup mirip dengan pekerja rumah tangga (PRT), namun dengan tanggung jawab yang lebih besar. Mbak Mun bercerita sudah setahun ini dia ditugaskan untuk menjaga Pak Bambang, lansia yang saat ini berusia 91 tahun. Mbak Mun sudah menjadi caregiver selama 12 tahun. Lokasinya berpindah-pindah, tapi tetap di sekitar wilayah Jabodetabek.

“Dulu itu saya sudah cari kerja. Saya sempat bekerja di pabrik bahkan jadi TKW di Arab Saudi. Pas kembali ke Indonesia, ada yang nawarin saya kerja jadi perawat lansia. Akhirnya saya jalanin sampai sekarang,” ujarnya ketika ditemui Bisnis di Tenteram Senior Care sambil menjaga Pak Bambang.

Mbak Mun mengaku tidak ada alasan khusus yang membuat dirinya terjun sebagai caregiver. Namun, dia mengatakan tertarik bekerja menjadi caregiver agar bisa menjaga orang tuanya sendiri di kampung.

Sebelum menjaga pasien senior, dia telah mendapat pelatihan khusus dari yayasan. Meski demikian, dia tak mendapatkan sertifikasi karena tidak terlalu dibutuhkan untuk pekerjaan di dalam negeri.

Beberapa keahlian yang harus dimiliki caregiver, yaitu cara memberi obat, melihat tanda-tanda vital, cara memandikan, dan membantu pasien untuk bergerak dari kasur atau kursi roda.

Selama 12 tahun menjadi caregiver, Mbak Mun mengaku sudah merawat pasien dengan berbagai latar belakang, antara lain pasien lansia aktif, stroke, demensia, hingga penyakit kritis seperti kanker.

Menurutnya, modal utama menjadi caregiver adalah rasa sabar tinggi dan fisik yang kuat. Dia mengatakan gaji yang didapat terus meningkat sesuai dengan pengalaman kerja. Mbak Mun bahkan mempromosikan pekerjaan yang dia geluti saat ini kepada sanak saudara.

“Dulu ketika baru mulai sebagai caregiver homecare gaji saya hanya Rp3 juta per bulan. Sekarang alhamdulillah bisa dapat Rp6 juta. Ada juga saudara dan tetangga yang minat jadi caregiver. Saya bilang modalnya yang penting ulet dan sabar,” tuturnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 1971, Sensus Penduduk 2020, dan Proyeksi Penduduk 2045

Lantas, apa strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan tenaga caregiver ke depannya? Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Agung Nur Rohmad mengatakan kebutuhan tenaga kerja di sektor kesehatan secara umum diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hal itu sesuai dengan dokumen proyeksi kebutuhan tenaga kerja per sektor dan jabatan 2025-2029 yang disusun oleh Kemnaker.

Oleh karena itu, pengembangan keterampilan melalui pelatihan vokasi maupun pendidikan vokasi bagi tenaga kesehatan sangat diperlukan termasuk untuk menjadi caregiver profesional.

"Ini dapat membuka peluang kerja yang signifikan di dalam negeri, terutama bagi generasi muda walaupun jumlah tenaga kerja caregiver masih lebih banyak yang dikirim bekerja di luar negeri, misalnya lewat skema penempatan government to government [G to G] dengan pemerintah Jepang," ujarnya ketika dihubungi Bisnis.

Kemnaker, melalui Ditjen Binalavotas, juga menyelenggarakan program pelatihan terkait caregiver baik di UPT BPVP atau bekerja sama dengan LPK Swasta melalui platform SIAPkerja.

Menurutnya, pelatihan vokasi tersebut tentunya diselenggarakan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah ditetapkan melalui Kepmenaker Nomor 28 tahun 2021 bidang Caregiver Lanjut Usia.

Beberapa UPT BPVP kami yang menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi caregiver, yaitu BBPVP Medan, BBPVP Semarang, dan BPVP Lombok Timur.

Sertifikasi kompetensi kerja caregiver, lanjutnya, juga menjadi perhatian dan prioritas dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). BNSP telah menetapkan skema sertifikasi untuk profesi caregiver yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja di sektor ini. Jumlah skema yang ditetapkan BNSP berjumlah 4 (empat) skema yaitu:

1. Skema Sertifikasi KKNi Kualifikasi 3 Bidang Caregiver;
2. Skema Sertifikasi KKNi Jenjang Kualifikasi 4 Caregiver;
3. Skema Sertifikasi Okupasi Caregiver Penyelia; dan
4. Skema Sertifikasi Okupasi Caregiver Pelaksana.

Selain itu, BNSP juga menetapkan lisensi serta membina Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang menyelenggarakan sertifikasi bidang caregiver.

"Adanya LSP yang mempunyai lisensi di bidang caregiver ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sertifikasi kompetensi serta menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah bersama swasta dalam menyediakan pekerjaan yang layak bagi tenaga kerja kita," imbuhnya.



*Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan
Agung Nur Rohmad. Dok Kemnaker RI*

Wakil Ketua Harian Asosiasi Senior Living Indonesia (ASLI) Trisno Muldani mengatakan beberapa isu terkait ekonomi perawatan, khususnya lansia, yakni keterbatasan fasilitas dan layanan, kekurangan tenaga pendamping profesional, stigma negatif panti jompo, kurangnya penghargaan terhadap profesi caregiver, serta kesenjangan antara implementasi dan kebijakan.

Menurutnya, implementasi profesi caregiver di Indonesia terbilang telat dibandingkan negara lain. Trisno menuturkan bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan baru menerbitkan aturan soal kualifikasi dan standar kompetensi pekerjaan profesi caregiver lansia pada 2021.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi baru merilis aturan soal spektrum keahlian jurusan caregiver di SMK pada 2024.

Sayangnya, dia mengatakan bahwa sebagian besar caregiver di Indonesia belum masuk dalam kategori pekerjaan formal.

Saat ini, negara-negara yang membutuhkan sudah meminta agar pekerja caregiver Indonesia memiliki sertifikasi. Menurutnya, sertifikasi dapat meningkatkan standar penghasilan para perawat lansia di dalam negeri.

“Sekarang banyak orang mau jadi caregiver di luar negeri, kenapa? Utamanya karena kesenjangan gaji. Bisa dibandingkan caregiver yang baru lulus sertifikasi dan home care gajinya Rp3,5 juta-Rp5 juta per bulan, kalau berpengalaman Rp6 juta-Rp7 juta. Nah, kalau caregiver di Jepang bisa dapat Rp15 juta-Rp25 juta sebulan,” ucapnya.

Meski demikian, Trisno yakin permintaan caregiver di dalam negeri akan terus bertambah. Dia memprediksi angka harapan hidup di Indonesia ke depan makin meningkat bisa mencapai 76-80 tahun. Makin panjang usia harapan hidup masyarakat, lanjutnya, semakin tinggi juga kebutuhan caregiver profesional. Tingginya permintaan juga lantaran populasi penduduk lansia di Indonesia yang hampir menyamai penduduk usia muda pada 2050.

Selain itu, dia melihat bahwa pengusaha yang terjun ke bisnis perawatan lansia, seperti senior living dan senior day care, juga meningkat. Belum lagi permintaan keluarga untuk merekrut caregiver di rumah atau home care. Jika pemerintah serius mendukung sektor lansia, Trisno yakin profesi keperawatan khususnya caregiver dapat menjadi solusi dari tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur.

“Kolaborasi antara pemerintah dan swasta sangat penting dalam meningkatkan awareness terhadap ekonomi keperawatan. Di satu sisi pengusaha ingin membuka fasilitas ramah lansia agar jumlah caregiver bertambah. Nah, sebaiknya pemerintah memberikan dukungan terkait iklim usaha di bidang senior care,” imbuhnya.

Ditemui terpisah, Anggota Badan Legislasi DPR I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan pihaknya berupaya untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) demi menghadirkan regulasi yang mampu melindungi pekerja rumah tangga, termasuk caregiver.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu pun menekankan konsistensi komitmen PDIP dalam mengawal pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang, terutama mengingat mayoritas pekerja rumah tangga merupakan perempuan yang sering kali menghadapi risiko diskriminasi dan kekerasan.

Selain itu, badai PHK tahun ini tidak hanya terjadi di sektor padat karya seperti manufaktur saja, melainkan juga mengancam sektor akomodasi hingga digital.

Merujuk pada data Kementerian Ketenagakerjaan, kasus PHK di Indonesia tercatat sebanyak 77.965 pekerja sepanjang 2024 atau meningkat 20,2% (year-on-year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 64.855 pekerja.

“Selain menjadi pahlawan devisa di luar negeri, profesi caregiver untuk merawat lansia di dalam negeri juga bisa menjadi alternatif pekerjaan bahkan solusi bagi masyarakat saat sektor manufaktur terpuruk akibat PHK,” kata Ketut.(*)

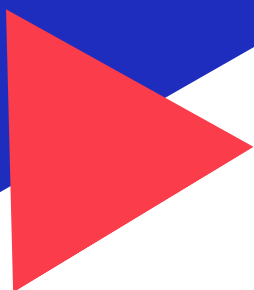
Artikel ini dimuat tanggal 28 Februari 2025

Tautan Artikel:

<https://s.id/KisahCaregiverMalaikatPenjagaKalaUsiaSenja>



9



09. Guru PAUD Bertahan Hidup dengan Gaji Rp250.000 per Bulan

Arief Rahman, Narasi TV

Karya jurnalistik audio visual ini bercerita tentang bagaimana kisah Sutriono, seorang laki-laki yang menjadi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di PAUD Do Re Mi, Jatinegara, Jakarta. Laki-laki yang menjadi guru PAUD bisa dikatakan jarang.

Sebab, mereka seakan otomatis menerima stigma dari masyarakat seperti banci. Para rekan sejawat perempuan guru PAUD mengatakan, sulit mencari laki-laki yang menjadi guru PAUD. Padahal, murid juga perlu laki-laki yang menjadi gurunya agar punya perspektif yang lebih utuh tentang masyarakat.

Sudah begitu, guru PAUD juga menerima upah yang kecil sekali hanya Rp 250.000 per bulan. Padahal sebelumnya Sutriono adalah karyawan swalayan yang memiliki gaji lebih besar dan stabil.

Sutriono mantap mendengarkan panggilan hatinya untuk mendidik anak-anak. Di tengah segala keterbatasan Sutriono mantap mendengarkan panggilan hatinya untuk mendidik anak-anak.



Video Youtube dan Reels Instagram diunggah pada tanggal 27 Februari 2025

Tautan Video Youtube:

<https://s.id/GuruPAUDBertahanHidupdenganGaji250rbperbulan>

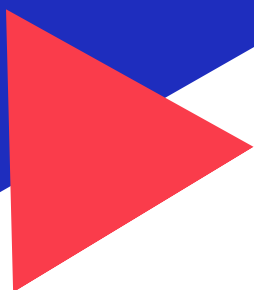


Tautan Video Reels:

<https://s.id/ReelsGuruPAUDBertahanHidup>



10



10. Merawat Anak Berkebutuhan Khusus, Ibu Berhenti Kerja

Afwan Purwanto, Kompas TV

Karya jurnalistik audio visual ini berkisah tentang para perempuan yang harus resign atau berhenti dari pekerjaannya karena harus merawat anak-anaknya yang berkebutuhan khusus.

Di satu sisi, mereka tentu membutuhkan pendapatan dari pekerjaannya. Namun, di sisi lain mereka juga harus bisa menyiapkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk merawat anak-anaknya.

Tak hanya para perempuan yang jadi orang tua anak berkebutuhan khusus, para perempuan lainnya pun banyak memutuskan untuk resign dari pekerjaannya karena harus menjadi ibu rumah tangga.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 menunjukkan, terjadi tren kenaikan jumlah perempuan yang resign karena alasan menjadi ibu rumah tangga.

Para perempuan ini harus merelakan karir dan pendapatannya serta mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk merawat anak-anaknya.

Hal ini menunjukkan kerja-kerja perawatan itu sejatinya juga perlu dukungan ekonomi. Namun, konsep ekonomi perawatan ini masih jarang jadi pembicaraan.



Video ini diunggah pada tanggal 4 Maret 2025

Tautan Video:

<https://s.id/MerawatAnakBerkebutuhanKhususIbuBerhentiKerja>



